



PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

2020

LAPORAN AKUNTABILITAS DAN KINERJA
TAHUNAN PEMERINTAH DAERAH





BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR **193** TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN DOKUMEN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA TAHUN 2020

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

Menimbang : a. dalam rangka lebih meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan Pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) perlu disusun untuk mengetahui kemampuan dalam penjabaran visi, misi, dan tujuan serta sasaran Organisasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;

4. Peraturan ...

Paraf Koordinasi	
Kepala Perangkat Daerah	Kabag Hukum

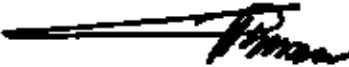
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 44);
6. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja dalam Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2015 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2020.
- KEDUA** : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan dokumen laporan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara kepada Presiden melalui Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai laporan capaian kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2020.
- KETIGA** : Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boroko
pada tanggal 18 JUNI 2021
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,


DEPRI PONTOH

Paraf Koordinasi	
Kepala Perangkat Daerah	Kabag Hukum
	



Kata Pengantar

Dengan memohon Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, *Allah swt* atas petunjuk dan bimbingan-Nya semata sehingga Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dapat menyelesaikan penyusunan **Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2020**, sebagai dokumen pertanggung jawaban atas pelaksanaan kinerja sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.



Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pasal 22 menyatakan bahwa Bupati/Walikota menyusun laporan kinerja tahunan pemerintah kabupaten/kota dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam melaksanakan amanat peraturan dan ketentuan yang berlaku dalam upaya *Good Governance & Clean Government* yaitu Undang-Undang No.28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, menyebutkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara. Hal ini menyiratkan bahwa wujud akuntabilitas dari penyelenggara pemerintah adalah mempertanggungjawabkan hasil akhir dan manfaat dari suatu program dan kegiatan yang dapat dirasakan oleh masyarakat.

Dari hasil analisis kinerja Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2020 terealisasi dengan capaian **kinerja Berhasil**, tingkat capaian sebesar **94,42%**. Laporan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2020 ini terdiri dari 4 Bab, yaitu:

- Bab I Pendahuluan; memuat Latar Belakang, Potensi Daerah, Kewenangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, Perangkat Daerah, Sumber Daya Aparatur, Sumber Daya Keuangan, dan Isu Strategis
- Bab II Perencanaan Kinerja; memuat Visi, Misi, Tujuan Pembangunan Daerah, Perjanjian Kinerja Tahun 2020, dan Indikator Kinerja Utama
- Bab III Akuntabilitas Kinerja; memuat Pengukuran Kinerja, Analisis Pengukuran Kinerja, Analisis Efisiensi Penggunaan Anggaran, dan Tindak Lanjut Rekomendasi Inspektorat Provinsi Sulawesi



Utara:

Bab IV Penutup Lampiran memuat Daftar Penghargaan yang diterima Pemerintah Kabupaten Bolang Mongondow Utara selama tahun 2020.

Aspek lain yang menjadi dasar penilaian keberhasilan pelaksanaan program pemerintahan adalah beberapa prestasi yang diperoleh selama tahun 2020, seperti prestasi sebagai Kabupaten terbaik dalam Konvergensi Penanganan Stunting se-Sulawesi Utara (Sulut), Kabupaten Pengelolaan Dana Desa Terbaik, Perencanaan Pembangunan Daerah Terbaik, Sensitifasional Awards, dll (terlampir).

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Bolang Mongondow Utara tahun 2020 ini, untuk menjadi bahan evaluasi dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dan meningkatkan kinerja tahun 2020.

Terima kasih.

Mopopiana, Motolabiana 'agu Monosandobana

Boroko, Maret 2021

BUPATI BOLANG MONGONDOW UTARA





Ikhtisar Eksekutif

Bismillahirrahmannirrafrim

Assalamualaikum Warakhmatullahii Wabarakatuh

Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2020 ini menyajikan informasi atas pelaksanaan pembangunan yang telah dilakukan, dilihat dari tingkat capaian kinerja tujuan dan kinerja sasaran strategis, selain itu juga mengungkapkan keberhasilan dan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis.

Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2020 atas pelaksanaan Rencana Kinerja Pemerintah Daerah melalui 8 Sasaran Strategis diukur dan realisasi 23 Indikator Kinerja Utama (IKU), seluruhnya mencapai kinerja dengan rata-rata capaian sebesar 94,29% dalam kategori Berhasil.

Secara garis besar hasil analisis capaian kinerja dapat kami sajikan dalam tabel analisis sebagai berikut:

Rangkuman Hasil Analisis Capaian Kinerja Tahun 2020

No	Kategori Capaian	Jumlah Sasaran	Jumlah Indikator	Hasil Analisis capaian kinerja indicator
1	2	3	4	5
1.	Sangat Berhasil	5	16	Kinerja sangat berhasil, efektif, efisien, inovatif dan bermanfaat.
2.	Berhasil	3	5	Kinerja berhasil, sesuai harapan, sedikit perbaikan, berorientasi kinerja.
3.	Cukup Berhasil	0	2	Kinerja cukup berhasil, perlu banyak perbaikan dan peningkatan kinerja, perlu konsistensi target dan integritas data, perlu diperjelas hasil yang akan dicapai SKPD.
4.	Kurang Berhasil	0	0	Kinerja kurang berhasil, perlu banyak perbaikan yang mendasar, kurangnya keterkaitan antara program/kegiatan dgn sasaran, perlu penajaman indikator outcome/output kegiatan dan perlu
5.	Tidak Ada Informasi (n.a)	0	0	Kinerja belum dilakukan pengukuran
Jumlah		8	23	





Berdasarkan tabel analisis diatas, bahwa kinerja tahun 2020 sangat berhasil, efektif dan efisien dalam penggunaan sumberdaya, serta inovatif dalam pelayanan, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Dari hasil analisis Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh 16 indikator kinerja utama yang dikategorikan sangat berhasil, 5 indikator kategori berhasil, dan 2 indikator kategori cukup berhasil;
2. Meningkatnya angka perkapita Bolaang Mongondow Utara Tahun 2020 sebesar 9,62 juta rupiah per tahun (PDRB-ADHK/ BPS);
3. Meningkatnya Angka Melek Huruf (AMH) tahun 2020 sebesar 99,64%;
4. Meningkatnya Usia Harapan Hidup (UHH) tahun 2020 dengan realisasi sebesar 67,66 Tahun, jika dibanding dengan tahun 2019 sebesar 66,21 Tahun, terjadi kenaikan sebesar 1,45 Tahun, hal ini menunjukan bahwa pola hidup sehat di masyarakat bolaang mongondow utara semakin baik.

Adapun hasil evaluasi capaian kinerja terhadap 8 (delapan) sasaran strategis tahun 2020 menurut misi, dapat dijabarkan dalam tabel dibawah ini:

Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran Setiap Misi

No	Pernyataan Misi Dalam RPJMD		Tujuan	Sesaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)
1	2		3	4	5	6
1.	Misi I	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan Berbudaya	1	4	9	94,43
2.	Misi II	Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good and clean Government);	1	2	4	99,74
3.	Misi III	Meningkatkan daya saing ekonomi berbasis pertanian, perikanan dan pariwisata	1	1	6	95,15
4.	Misi IV	Memantapkan penerataan pembangunan Infrastruktur wilayah yang handal	1	1	4	88,36
Capaian rata-rata Kinerja setiap misi						94,42

Tabel diatas menggambarkan bahwa capaian sasaran strategis rata-rata dalam kategori berhasil.

Berdasarkan analisis tingkat capaian sasaran dibandingkan tahun 2019, pada tahun 2020 dari 8 sasaran menunjukkan bahwa ada beberapa indikator yang capalannya menurun ini dikarenakan pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menurun drastis hingga pada



angka 0,71% . Laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018 sebesar 6,18% dan pada tahun 2019 sebesar 6,17%. Sedangkan capaian target pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 yang ditargetkan 6,21% hanya dapat tercapai 2,74%. Kondisi pandemi global Covid-19 yang bermula pada triwulan kedua tahun 2020 di Indonesia sangat mempengaruhi perekonomian nasional dan daerah. Dampak yang ditimbulkan oleh karena penyebaran Covid-19 sepanjang tahun 2020 tidak hanya mempengaruhi kondisi sosial masyarakat namun juga berdampak pada kondisi ekonomi akibat adanya kebijakan fiskal pemerintah untuk refocusing dan realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19

Rekomendasi dari Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara atas evaluasi penyelenggaraan SAKIP tahun 2019, telah dalam proses tindaklanjut, dan telah direncanakan tindak lanjut perbaikan pada tahun 2020.

Demikian, mudah-mudahan dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (UKJIP) ini menjadikan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara lebih maju dalam kancah pembangunan daerah serta lebih menciptakan Bolaang Mongondow Utara yang berkelanjutan, Mandiri, Berbudaya dan berdaya saing.

Terimakasih, Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

"Mopopiana, Mototabiana Agu Mononandobana"



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	I
Ikhtisar Eksekutif	III
DAFTAR ISI	VI
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GRAFIK	x
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Potensi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	1
1.3. Kewenangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	3
1.4. Organisasi Perangkat Daerah	4
1.5. Isu Strategis (Strategis Issued)	8
1.6. Sistematika Penyajian	9
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	12
2.1. Perencanaan Kinerja Tahun 2020	12
2.1.1. VISI	12
2.1.2. MISI	13
2.1.3. TUJUAN	13
2.1.4. SASARAN STRATEGIS	14
2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	17
2.3. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)	19
2.4. PERJANJIAN KINERJA (PK)	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	29
3.1. Capaian Kinerja	29
3.2. Pengukuran Kinerja	31
3.3. Analisis Kinerja	34
3.4. Akuntabilitas Keuangan	66
3.4.1. Pendapatan Daerah	67



3.4.2. Belanja Daerah.....	68
BAB IV PENUTUP.....	79
A. Kesimpulan	79
B. Peluang perbaikan	80



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Penduduk	3
Tabel 1. 2 Susunan Organisasi	7
Tabel 2. 1 Sasaran Strategis Jangka Menengah Tahun 2018-2023.....	14
Tabel 2. 2 Matriks Hubungan Visi, Misi, dan Tujuan	15
Tabel 2. 3 Indikator Kinerja Utama 2018-2023	17
Tabel 2. 4 Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2020.....	19
Tabel 2. 5 Perjanjian Kinerja Tahun 2020.....	20
Tabel 2. 6 Rencana Program dan Anggaran Perjanjian Kinerja Tahun 2020.....	22
Tabel 3. 1 Skala Interval dan Predikat Capaian Kinerja	30
Tabel 3. 2 Capaian Kinerja Setiap Misi	30
Tabel 3. 3 Pengukuran Kinerja Tahun 2020.....	31
Tabel 3. 4 Capaian Kinerja Misi Per Sasaran	32
Tabel 3. 5 Rangkuman Hasil Analisis Capaian Kinerja Sasaran.....	33
Tabel 3. 6 Capaian Kinerja Tujuan.....	34
Tabel 3. 7 Capaian Kinerja Indikator ke 1 Tujuan 1	35
Tabel 3. 8 Capaian Kinerja Indikator ke 2 Tujuan 1	36
Tabel 3. 9 Capaian Kinerja Indikator ke 3 Tujuan 1	37
Tabel 3. 10 Kategori Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi.....	38
Tabel 3. 11 Capaian Kinerja Indikator Tujuan 2	39
Tabel 3. 12 Capaian Kinerja Indikator Tujuan 3	39
Tabel 3. 13 Capaian Kinerja Indikator Tujuan 4	40
Tabel 3. 14 Analisis Pencapaian Sasaran 1	41
Tabel 3. 15 Sarana Gedung Sekolah	45
Tabel 3. 16 Kebijakan Bantuan Akhir Studi	45
Tabel 3. 17 Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah.....	46
Tabel 3. 18 Pengukuran Pencapaian Sasaran 2	46
Tabel 3. 19 Presentase Morbiditas Penyakit Menular dan Tidak Menular.....	49
Tabel 3. 20 Akreditas Puskesmas Tahun 2015-2020	50
Tabel 3. 21 Analisis Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3	52
Tabel 3. 22 Program Sosial dan Bantuan Langsung Tunai Tahun 2020.....	53
Tabel 3. 23 Analisis Capaian Indikator Kinerja Sasaran 4	54
Tabel 3. 24 Kondisi Angkatan Kerja Tahun 2020	55
Tabel 3. 25 Analisis Capaian Indikator Kinerja Sasaran 5	56
Tabel 3. 26 Opini BPK	57
Tabel 3. 27 Inovasi Pengelolaan Keuangan Daerah	57
Tabel 3. 28 Perkembangan Nilai SAKIP	59



Tabel 3. 29 Analisis Sasaran 6.....	60
Tabel 3. 30 Analisis Sasaran 7.....	60
Tabel 3. 31 Analisis Sasaran 8.....	62
Tabel 3. 32 PAMSIMAS dan SPAM Tahun 2020.....	63
Tabel 3. 33 IPAL yang Terbangun	64
Tabel 3. 34 Universal Access	64
Tabel 3. 35 Kualitas Lingkungan.....	65
Tabel 3. 36 Capaian PAD Tahun 2020.....	67
Tabel 3. 37 Capaian Pendapatan Transfer	67
Tabel 3. 38 Capaian Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	68
Tabel 3. 39 Capaian Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	68
Tabel 3. 40 Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung T.A. 2020.....	69
Tabel 3. 41 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung T.A. 2020.....	70
Tabel 3. 42 Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung T.A. 2019.....	70
Tabel 3. 43 Proporsi Anggrana Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung terhadap total Belanja Daerah T.A. 2020	71
Tabel 3. 44 Realisasi dan Efisiensi Anggaran 2020 per Program.....	71



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. 1 Luas Wilayah Per Kecamatan	2
Grafik 3. 1 Perkembangan IPM	36
Grafik 3. 2 Tingkat Kemiskinan	37
Grafik 3. 3 Perbandingan Penduduk Produktif dan usia non produktif	38
Grafik 3. 4 Laju Pertumbuhan Ekonomi	39
Grafik 3. 5 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi	40
Grafik 3. 6 Perbandingan Kondisi Perkembangan HLS	41
Grafik 3. 7 Perbandingan HLS	42
Grafik 3. 8 Perbandingan RLS	42
Grafik 3. 9 Perbandingan Capaian RLS dengan Kabupaten Lain Tahun 2020	43
Grafik 3. 10 Presentase AMH Per Kecamatan	43
Grafik 3. 11 Angka Kelulusan SD/MI Sederajat	44
Grafik 3. 12 Angka Kelulusan SMP/MTs Sederajat	44
Grafik 3. 13 Kualifikasi Tenaga Pendidik	46
Grafik 3. 14 Angka Harapan Hidup	47
Grafik 3. 15 Perbandingan Angka Harapan Hidup	47
Grafik 3. 16 Angka Kematian Bayi	48
Grafik 3. 17 Angka Prevalensi Stunting	48
Grafik 3. 18 Faktor Pendukung	51
Grafik 3. 19 Pengeluaran Perkapita Penduduk	53
Grafik 3. 20 Gini Ratio	54
Grafik 3. 21 Peningkatan Angkatan Kerja	55
Grafik 3. 22 Tingkat Pengangguran Terbuka	56





DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Plagam Penghargaan.....	49
Gambar 3. 2 Layanan Air Minum dan Sanitasi Yang Terbangun	63



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah, Pelaporan kinerja Instansi Pemerintah selanjutnya secara teknis diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) meliputi proses penyusunan rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja, serta evaluasi kinerja dan reviu kinerja. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam menyelenggarakan SAKIP tahun 2020 telah menyusun:

- 1) Rencana strategis berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 01 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018-2023;
- 2) Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor ... Tahun ... tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 sebagai dasar rencana pembangunan tahun 2020;
- 3) Perjanjian Kinerja (PK) Bupati Bolaang Mongondow Utara tahun 2020.
- 4) Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2018-2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 12 Tahun 2020

Sedangkan pelaporan kinerja termasuk pengukuran kinerja atas rencana kinerja tahun 2020 tersebut, akan disajikan dalam buku ini.

1.2. Potensi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dibentuk sebagai daerah otonom baru berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 pada tanggal 2 Januari 2007, hasil



pemekaran Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara. Berdasarkan posisi geografinya, letak astronomi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara memiliki batas-batas: sebelah utara berbatasan dengan Laut Sulawesi; sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Posigadan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan; sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo; sedangkan sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Sangtombolang, Kabupaten Bolaang Mongondow. Sebagai daerah yang terletak di garis Khatulistiwa, maka Kabupaten Bolaang Mongondow Utara hanya mengenal dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan.

Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terdiri dari 6 Kecamatan dan 107 desa/kelurahan. Luas wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, adalah berupa daratan seluas 1.856,86 km². Luas daratan masing-masing Kecamatan, yaitu: Sangkub (567,85 Km²), Bintauna (348,94 Km²), Bolangitang Timur (445,64 Km²), Bolangitang Barat (293,75 Km²), Kaidipang (85,09 Km²) dan Pinogaluman (115,59 Km²).

Grafik 1. 1 Luas Wilayah Per Kecamatan



Dalam pengambilan kebijakan pembangunan, kepadatan penduduk dalam suatu wilayah sangat penting diketahui dan salah satu bahan pertimbangan dalam merencanakan pembangunan wilayah tersebut.

Semakin padat suatu wilayah maka semakin besar perhatian yang diperlukan dalam penyusunan kebijakan pembangunan. Jika dihubungkan dengan masalah-masalah sosial dan lingkungan hidup, maka semakin padat suatu wilayah, semakin besar kemungkinan terjadinya kerawanan sosial dan dampaknya terhadap lingkungan sekitarnya.

Penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berdasarkan hasil registrasi penduduk tahun 2019 sebanyak 85.347 jiwa yang terdiri atas 43.764 jiwa penduduk laki-laki dan 41.583 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2018, penduduk mengalami pertumbuhan sebesar 7,53 %. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2019 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 106,23 %.



Tabel 1. 1 Jumlah Penduduk dan Pertumbuhan Penduduk

No	Kecamatan	Tahun			Laju Pertumbuhan per (2018-2019)
		2017	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Sangkub	10.238	10.406	10.954	5,26
2.	Bintauna	12.176	12.069	15.215	20,06
3.	Bolangitang Timur	14.281	14.445	15.527	7,49
4.	Bolangitang Barat	15.972	16.206	16.390	1,12
5.	Kaidipang	15.321	15.744	15.041	-4,46
6.	Pinogaluman	10.449	10.494	12.220	16,87
Bolaang Mongondow Utara		78.437	79.366	85.347	7,53

(sumber BPS : Bolmut Dalam Angka 2019,2020)

1.3. Kewenangan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

A. Kedudukan

Bupati yang karena jabatannya berkedudukan sebagai wakil pemerintah diwilayah Kabupaten dan dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden Melalui Gubernur. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Bupati dibantu oleh Wakil Bupati.

B. Kewajiban

Bupati dan Wakil Bupati berkewajiban :

- Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- Memelihara ketenaman dan ketertiban masyarakat;
- Melaksanakan kehidupan demokrasi;
- Mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
- Menjaga etika dan norma dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah;
- Memajukan dan mengembangkan daya saing daerah;
- Melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;
- Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah;
- Menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah; dan
- Menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah dihadapan Rapat Paripurna DPRD.



C. Tugas dan Wewenang

Berdasarkan Pasal 65 Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah maka Bupati sebagai Kepala Daerah Kabupaten mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

1. memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
2. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
3. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
4. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas Bersama.
5. mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
6. mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan
7. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.4. Organisasi Perangkat Daerah

A. Sekretariat Daerah Kabupaten

- Kedudukan

Sekretariat Daerah Kabupaten adalah unsur staf Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah Kabupaten yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

- Tugas Pokok

Sekretaris Daerah mempunyai tugas pokok membantu bupati/wali kota dalam penyusunan kebijakan dan pengordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

- Fungsi

1. Pengordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
2. Pengordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;;
4. Pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati kota terkait dengan tugas dan fungsinya..



B. Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah

- *Kedudukan*

Sekretariat dipimpin oleh sekretaris DPRD kabupaten yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD kabupaten dan secara administratif bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris Daerah kabupaten/kota.

- *Tugas Pokok*

Sekretaris DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD kabupaten/kota, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD kabupaten/kota dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

- *Fungsi*

1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD kabupaten;
2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD kabupaten;
3. Fasilitasi Penyelenggaraan rapat DPRD kabupaten; dan
4. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD kabupaten.

C. Inspektorat Daerah

- *Kedudukan*

Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris Daerah kabupaten/kota.

- *Tugas Pokok*

Dinas mempunyai tugas membantu bupati/wali kota membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

- *Fungsi*

1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas perintugasan bupati;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
5. Pelaksanaan administrasi inspektorat kabupaten; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.



D. Dinas Daerah

- *Kedudukan*

Dinas merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan dipimpin oleh kepala dinas Daerah kabupaten/kota yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris Daerah kabupaten.

- *Tugas Pokok*

Dinas mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

- *Fungsi*

1. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati/wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

E. Badan Daerah

- *Kedudukan*

Badan Daerah merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten dan dipimpin oleh kepala badan Daerah kabupaten yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris Daerah kabupaten/kota.

- *Tugas Pokok*

Badan Daerah mempunyai tugas membantu bupati/wali kota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.

- *Fungsi*

1. Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

F. Kecamatan

- *Kedudukan*

Kecamatan Dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan



pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan, dipimpin oleh camat atau sebutan lain yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah kabupaten.

- *Tugas Pokok*

Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh bupati/wali kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.

- *Fungsi*

- menyelenggarakan Urusan Pemerintahan umum;
- mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati/Wali kota;
- mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau sebutan lain dan/atau kelurahan;
- melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah kabupaten/kota yang ada di kecamatan; dan
- melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

G. Struktur Organisasi

Bentuk dan Susunan Pemerintahan Daerah sebagai berikut:

- Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Susunan Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terdiri dari:

Tabel 1. 2 Susunan Organisasi

No:	Susunan Organisasi	Jumlah
1.	Sekretariat Daerah	1
2.	Sekretariat DPRD	1
3.	Inspektorat Daerah	1
4.	Dinas Daerah	21
5.	Badan	4
6.	Kantor	1



7.	Kecamatan	6
	Jumlah Total	35

1.5. Isu Strategis (Strategic Issues)

Isu Strategis adalah suatu proses identifikasi lingkungan strategis dengan memperhatikan situasi dan kondisi lingkungan internal dan eksternal dalam pemerintahan. Setelah melakukan proses identifikasi dari berbagai faktor, maka dirumuskan beberapa isu strategis sebagai bagian dari rencana strategis Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, sebagai berikut :

1. Peningkatan ketahanan kinerja PDRB;
2. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara selama 5 tahun terakhir mencapai rata-rata 6,29%;
3. Sistem pelayanan investasi melalui teknologi informasi;
4. Perkuatan basis ekonomi kerakyatan dengan optimalisasi segenap potensi;
5. Keserasian kebijakan kependudukan dalam rangka peningkatan kualitas penduduk dan pengarahan mobilitas dan persebaran penduduk yang serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan;
6. Perluasan kesempatan kerja;
7. Kesetaraan derajat kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
8. Mutu pelayanan kesehatan;
9. Kemandirian dan peran serta masyarakat masih belum optimal;
10. Peningkatan pemerataan mutu pendidikan;
11. Peningkatan mutu lulusan dan kompetensi pendidik yang berbasis pada kearifan dan budaya lokal;
12. Penguasaan teknologi dan informasi dalam rangka mewujudkan hasil pendidikan berdaya saing tinggi;
13. Peningkatan dan perluasan kesetaraan gender yang dititikberatkan pada bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, sosial budaya, lingkungan serta di semua sektor dan bidang kehidupan lainnya;
14. Pemasyarakatan olahraga, peningkatan ruang publik untuk olahraga, dan peningkatan prestasi olahraga;
15. Pengembangan IPTEK untuk pertanian berbasis sains dan TI;
16. Pengurangan resiko bencana serta penguatan kelembagaan penanggulangan bencana;
17. Masih adanya desa-desa yang berpotensi rawan pangan yang disebabkan kondisi alam;
18. Kuantitas dan kualitas tenaga penyuluh masih kurang;
19. Meningkatkan kemampuan daerah dalam pengelolaan pengembangan struktur ruang;
20. Mendorong pemberdayaan masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan,





- pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan struktur ruang;
21. Perubahan iklim mikro, pencemaran air permukaan dan polusi udara serta penurunan muka air tanah;
 22. Pencapaian proporsi lahan untuk kawasan lindung, baik kawasan hutan maupun non hutan;
 23. Mempertahankan kawasan resapan air dan kawasan berfungsi hidrogeologis;
 24. Peningkatan penyediaan fasilitas pelayanan transportasi yang menunjang keamanan dan kenyamanan pemakai jalan;
 25. Kerjasama dengan swasta dalam penyediaan energi listrik;
 26. Penyediaan listrik yang menjangkau sampai wilayah terpencil;
 27. Pengembangan energi listrik baru terbarukan;
 28. Pengembangan energi listrik berbasis kemasyarakatan;
 29. Pelayanan kepada masyarakat secara *on-line*,
 30. Pemanfaatan media komunikasi guna peningkatan akses informasi masyarakat melalui diseminasi informasi dan fasilitasi kegiatan penyiaran;
 31. Mengembangkan manajemen pariwisata yang mendukung pengembangan ekonomi;
 32. Penegasan batas territorial wilayah penangkapan;
 33. Proyeksi jumlah ikan dan lainnya diperkirakan akan terus meningkat;
 34. Pengelolaan sampah mandiri;
 35. Pengembangan bio-energi;
 36. Pelaksanaan 3R (*Recycle, Reuse, Reduce*)
 37. Pencemaran air laut;
 38. Perlunya pengembangan aparatur yang memiliki daya inovasi dan kreativitas;
 39. Dibutuhkannya aparat yang memiliki kompetensi dan budaya kerja sebagai abdi masyarakat atau pelayan masyarakat, merespon isu-isu terkait *globalises' dan civil society*;
 40. Penanaman pola hidup patuh hukum mendukung terwujudnya aparatur dan masyarakat yang adil dan responsif hukum;
 41. Mewujudkan sinergi antar pelaku politik;
 42. Penguatan peran pemerintah sebagai fasilitator dan advokasi kebijakan publik;
 43. Peningkatan kesadaran politik masyarakat.

1.6. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara selama 1 (satu) tahun anggaran. Mengukur keberhasilan ataupun kegagalan capaian kinerja organisasi diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya



capaian pelaksanaan program kerja dan kegiatan pada tahun berkenaan guna perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kabupaten Bolsang Mongondow Utara berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana sistematika penyusunan LKIP dibawah ini:

Surat Keputusan Penyusunan LKIP

Surat Pernyataan Rencana

Kata Pengantar

Ikhtisar Eksekutif

Daftar Isi

Bab I - Pendahuluan,

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issues*) yang sedang dihadapi organisasi;

Bab II - Perencanaan dan Penetapan Kinerja,

Menjelaskan secara ringkas perencanaan strategis dan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2020;

Bab III - Akuntabilitas Kinerja Tahun 2020,

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.



B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

Bab IV - Penutup,

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan ditakukuan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

Lampiran:



BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Perencanaan Kinerja Tahun 2020

Rencana strategis merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu yang bersi visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang akan dilaksanakan melalui kebijakan dan program kepala daerah. Hal ini diamanatkan dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 pada pasal 260 menyebutkan bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

Secara garis besar perencanaan kinerja jangka menengah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah sebagai berikut :

2.1.1. VISI

Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2018-2023 yang hendak dicapai dalam tahapan keempat Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah:

*"Mewujudkan Bolaang Mongondow Utara Yang Berkelaanjutan, Mandiri,
Berbudaya dan Berdaya Saing."*

Pernyataan visi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tersebut mempunyai pernahaman sebagai berikut :

1. *Berkelaanjutan* memiliki makna bahwa, apa yang telah dicapai pada periode 5 (lima) tahun sebelumnya (2013-2018) sebagaimana telah tertuang dalam dokumen RPJMD akan dilaksanakan secara berkesinambungan sebagai sebuah karya nyata untuk masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
2. *Mandiri*, menunjukkan tekad dan keseriusan pemerintah beserta seluruh elemen masyarakat untuk mewujudkan kemandirian pangan serta menjadikan Bolaang Mongondow Utara unggul dalam keanekaragaman pangan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan daerah disekitarnya. Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagai Kawasan agri bisnis menjadikan pertanian dan segala sumberdaya, usaha, kelembagaan dan jaringan bisnis (hulu-hilir) Pertanian sebagai basis perekonomian daerah dalam rangka pengembangan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;



3. *Berbudaya* memiliki makna bahwa pembangunan yang dilaksanakan adalah menciptakan sumber daya manusia yang memiliki karakter atau kepribadian dengan mengedepankan nilai-nilai kearifan lokal yang dinamis dan inovatif, serta mampu memfasilitasi proses modernisasi;
4. *Berdaya Saing* memiliki makna bahwa, hasil-hasil pembangunan yang dilaksanakan memiliki keunggulan yang kompetitif serta memiliki akses pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2.1.2. MISI

Dalam pencapaian visi tersebut, maka dirumuskan 4 (empat) misi yang akan dilaksanakan sebagai kunci keberhasilan, yaitu :

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan Berbudaya;
2. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good and clean Government);
3. Meningkatkan daya saing ekonomi berbasis pertanian, perikanan dan pariwisata;
4. Memantapkan pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah yang handal.

2.1.3. TUJUAN

Berdasarkan visi, misi dan isu-isu strategis yang ada, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 tahun adalah, sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia : Kualitas sumber daya manusia masih tergolong rendah yakni 65,60 pada tahun 2017, ditargetkan meningkat menjadi 66,23 pada tahun 2023.
2. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani : Pelaksanaan reformasi birokrasi adalah menjawab tuntutan pelayanan pemerintah terhadap masyarakat. Sehingga itu seluruh prioritas area perubahan dalam rangka reformasi birokrasi akan konsisten dilaksanakan sampai dengan tahun 2023.
3. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkeadilan : Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang lebih terbuka dan berkualitas diharapkan dapat mengurangi kesenjangan pendapatan sehingga ditargetkan pertumbuhan yang positif terus terjaga hingga pada angka 6,24 persen pada tahun 2023.
4. Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur sesuai tata ruang yang berwawasan lingkungan : Kualitas lingkungan menjadi syarat mutuik yang terus dipertahankan dan ditingkatkan sejalan pembangunan infrastruktur. Sedangkan dari aspek kuantitas sampai dengan tahun 2023 tingkat pencapaian pembangunan infrastruktur terhadap rencana tata ruang ditargetkan sesuai dengan arahan indikasi program Utama.



2.1.4. SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis ditetapkan untuk dapat mengukur pencapaian tujuan, dimana sasaran strategis dapat menunjukkan ukuran keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan. Dalam mewujudkan tujuan pembangunan ditetapkan sasaran-sasaran pokok pembangunan:

Tabel 2. 1 Sasaran Strategis Jangka Menengah tahun 2018-2023

No	Sasaran Strategis
1.	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat;
2.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
3.	Meningkatnya daya beli masyarakat;
4.	Menurunnya beban pengeluaran keluarga;
5.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan;
6.	Meningkatnya pelayanan public;
7.	Pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pengelolaan potensi unggulan daerah/local; dan
8.	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar dan infrastruktur wilayah yang berwawasan lingkungan.

Penjabaran misi dalam tujuan pembangunan daerah termasuk indikator dan target disajikan dalam tabel sbb :



Tabel 2. 2 Matriks Hubungan Visi, Misi dan Tujuan

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun	Kondisi Awal Tahun 2018	Target Capaian Tahun					Kondisi Akhir Tahun 2023
						2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan Berbudaya	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	1. Hemparan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	11,89	11,91	11,97	11,99	12,02	12,04	12,04
			2. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7,92	7,96	8,03	8,07	8,41	8,52	8,52
			3. Angka Minik Huruf	Tahun	95,81	99,82	99,98	99,70	99,91	99,71	99,71
			4. Angka kelulusan SDMM sedekat	Persen	98,00	100,0-0	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			5. Angka kelulusan SMP/MTs sedekat	Persen	99,00	99,50	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		Meningkatnya derajat ketidaktuaan masyarakat	6. Angka Hampan Hidup	Tahun	66,99	67,03	67,17	67,23	67,38	67,41	67,41
			7. Rata-rata Pengeluaran Perkapita Ril Yang Disusulkan (daya beli)	Juta/miliar	8,732	8,871	9,010	9,149	9,288	9,427	9,427
		Meningkatnya daya beli masyarakat	8. Gini Ratio	Poin	0,35	0,32	0,3	0,29	0,28	0,27	0,27
			9. Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4,71	4,80	4,58	4,43	4,36	4,24	4,24
			10. Opsi-BPK	predikat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Menyajikan tata kelola pemerintahan yang baik (Good and clean Government)	Menghindarkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Meningkatnya kualitas Pemeliharaan Peneritahan	1. Nilai LPPD	Poin	2.8364	2.937	2.95	3	3.0025	30.100	3.035
			2. Nilai LKIP	Nilai	C	CC	B	BB	BB	A	A
			3. Indeks pelayanan publik	Point	3,27	3,30	3,33	3,37	3,40	3,43	3,43
		Meningkatnya Pelayanan Publik	4. Indeks pelayanan publik	Point	3,27	3,30	3,33	3,37	3,40	3,43	3,43
Meningkatkan Daya Saing ekonomi berbasis pariwisata, pertanian dan perindustrian	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang aman dan berasih	Pembentukan ekonomi kerakyatan dan pengelolaan pola resiko guna aman dan berasih	1. Kontribusi sub sektor pertanian terhadap PDRB	Persen	29,14	30,97	32,80	34,03	36,46	38,29	38,29
			2. Nilai Tukar Petani	Persen	94,56	95-100	>100	>100	>100	>100	>100



			3. Kontribusi sub sektor pertanian terhadap PDRB	Persen	8,60	9,14	9,68	10,22	10,74	11,30	11,30
			4. Nilai Tukar Nasional	Persen	98,58	100	>100	>100	>100	>100	>100
			5. Kontribusi sektor Akomodasi, dan Makan Minum terhadap PDRB	Persen	0,29	0,30	0,37	0,43	0,50	0,58	0,58
			6. Kontribusi sub sektor Keseharian, Hiburan dan Rekreasi terhadap PDRB (sektor jasa lainnya)	Persen	0,68	0,70	0,80	0,90	1,00	1,00	1,00
Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur wilayah yang berasal	Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur sesuai tata ruang yang berwawasan lingkungan	Menyediakan: infrastruktur dasar dan infrastruktur wilayah yang berwawasan lingkungan	1. Cakupan Universal Akses	Persen	67,95	74,28	80,71	87,14	93,57	100,00	100,00
			2. Persentase Penempatan Infrastruktur	Persen	70,50	71,50	72,50	73,50	74,50	75,50	75,50
			3. Persentase kepatuhan terhadap RTRW	Persen	70,38	83,00	86,00	89,00	90,00	96,00	96,00
			4. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	persen	33,33	33,33	66,67	66,67	66,67	100,00	100,00



2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Berdasarkan saran/arahan serta coaching clinic dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Asisten Deputi Bidang Perumusan Kebijakan Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan dan Tin) bahwa sasaran dan indikator kinerja yang ada dalam RPJMD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dapat diringkas, dipilih sasaran yang betul-betul strategis dan indikator kinerja utamanya. Sesuai arahan tersebut sehingga indikator kinerja sasaran semula berjumlah 24 indikator kinerja utama menjadi 23 indikator kinerja utama (ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Utara Nomor 12 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2018-2023. Selengkapnya sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Indikator Kinerja Utama 2018-2023

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGUKURAN, TIPE PERHIT时UNGAN	SUMBER DATA
1	2	3	4
1. Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	1.1 Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	<ul style="list-style-type: none"> > Formulasi pengukuran : Jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal. > Tipe Perhitungan : Absolut 	Dikbud
	1.2 Harapan Lama Sekolah (HLS)	<ul style="list-style-type: none"> > Formulasi pengukuran : Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan diwujudkan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dihitung pada usia 7 tahun keatas. > Tipe Perhitungan : Absolut 	Dikbud
	1.3 Angka Melek Huruf (AMH)	<ul style="list-style-type: none"> > Formulasi pengukuran : Jumlah penduduk (usia diatas 15 tahun) yang bisa menulis pada tahun : Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas x 100% > Tipe Perhitungan : Absolut 	Dikbud
	1.4 Angka kelulusan SD/MI sederajat	<ul style="list-style-type: none"> > Formulasi pengukuran Jumlah lulusan jenjang pendidikan SD/MI : Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang pendidikan SD/MI x 100% > Tipe Perhitungan : Absolut 	Dikbud
	1.5 Angka kelulusan SMP/MTs sederajat	<ul style="list-style-type: none"> > Formulasi pengukuran Jumlah lulusan jenjang pendidikan SMP/MTs : Jumlah siswa tingkat tertinggi pada jenjang pendidikan SMP/MTs x 100% > Tipe Perhitungan : Absolut 	Dikbud
2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	2.1 Angka Harapan Hidup (AHH)	<ul style="list-style-type: none"> > Formulasi pengukuran Jumlah penduduk (usia diatas 15 tahun) yang bisa menulis : Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas x 100% > Tipe Perhitungan : Absolut 	Dinkes



3. Meningkatnya daya beli masyarakat	3.1 Rata-rata Pengeluaran Perkapita RI yang Diresmikan (Dayabel)	<ul style="list-style-type: none"> > Formulasi pengukuran : Rata-rata pengeluaran perkapita per tahun pada tahun t : HK tahun t x 100 > Tipe Perhitungan : Absolut 	Bapelitbang
	3.2. Gini Ratio	<ul style="list-style-type: none"> > Formulasi pengukuran : Nilai gini ratio berkisar antara 0 dan 1, jika : G < 0,3 = ketimpangan rendah G 0,3 < G < 0,5 = ketimpangan sedang G > 0,5 = ketimpangan tinggi > Tipe Perhitungan : Absolut 	Bapelitbang
4. Meningkatnya beban pengeluaran keluarga	4.1 Tingkat Pengangguran Terbuka	<ul style="list-style-type: none"> > Formulasipengukuran jumlah Pengangguran : Angkatan Kerja x 100% > Tipe Perhitungan : Absolut 	Dinasker
5. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	5.1. Opini BPK	<ul style="list-style-type: none"> > Formulasi pengukuran : Penilaian opini yang di keluarkan oleh BPK terhadap laporan keuangan daerah > Tipe Perhitungan : Absolut 	BPKD
	5.2. Nilai LPPD	<ul style="list-style-type: none"> > Formulasi pengukuran : Hasil penilaian terhadap laporan penyelenggaraan pemerintah daerah > Tipe Perhitungan : Absolut 	Sekda
	5.3. Nilai SAKIP	<ul style="list-style-type: none"> > Formulasi pengukuran : Hasil penilaian terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah > Tipe Perhitungan : Absolut 	Sekda
6. Meningkatnya pelayanan publik	6.1. Indeks Pelayanan Publik	<ul style="list-style-type: none"> > Hasil evaluasi pelayanan publik pada unit penyelenggaraan pelayanan publik tahun n-1 > Tipe Perhitungan : Absolut 	Sekda
7. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pengelolaan potensi unggulan daerah lokal	7.1. Kontribusi Sub Sektor Pertanian terhadap PDRB	<ul style="list-style-type: none"> > Formulasi pengukuran : PDRB sector pertanian : Total PDRB x 100% > Tipe Perhitungan : Absolut 	Distan
	7.2. Nilai Tukar Petani	<ul style="list-style-type: none"> > Formulasi pengukuran : Indeks yang diterima petani : Indeks yang dibayar petani x 100% > Tipe Perhitungan : Absolut 	Distan
	7.3. Kontribusi Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB	<ul style="list-style-type: none"> > Formulasi pengukuran : PDRB sub sector perikanan : Total PDRB x 100% > Tipe Perhitungan : Absolut 	DKP
	7.4. Nilai Tukar Nelayan	<ul style="list-style-type: none"> > Formulasi pengukuran : Indeks yang diterima nelayan : Indeks yang dibayarnyalayan x 100 > Tipe Perhitungan : Absolut 	DKP
	7.5. Kontribusi Sektor Akomodasi Dan Makan Minum terhadap PDRB	<ul style="list-style-type: none"> > Formulasi pengukuran : PDRB sector akomodasi dan makan minum : Total PDRB x 100% > Tipe Perhitungan : Absolut 	Dispar
	7.6. Kontribusi Sub Sektor Kesenian, Hiburan dan Rekreasi terhadap PDRB (Sektor Jasa Lainnya)	<ul style="list-style-type: none"> > Formulasi pengukuran : PDRB sub sector kesenian, hiburan dan rekreasi : Total PDRB sector jasa lainnya x 100% > Tipe Perhitungan : Absolut 	Dispar



B. Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar dan infrastruktur wilayah yang berwawasan lingkungan	8.1 Cakupan Akses	<ul style="list-style-type: none"> > Formulasi pengukuran : ((%Cakupan akses terhadap air bersih + (100-% kawasan kumuh) + %Cakupan akses terhadap sanitasi)) : 3 x 100% > Tipe Perhitungan : Absolut 	PUPR
	8.2 Persentase pemanfaatan infrastruktur	<ul style="list-style-type: none"> > Formulasi Pengukuran : Persentase ketersediaan jalan kondisi mantap + Persentase daerah ingasi kabupaten kondisi baik : 2 x 100% > Tipe Perhitungan : Absolut 	PUPR
	8.3 Persentase Kepatuhan terhadap RTRW	<ul style="list-style-type: none"> > Formulasi Pengukuran : Jumlah pemanfaatan lahan yang dilaksanakan sesuai rekomendasi / Jumlah rekomendasi yang diterbitkan x 100% > Tipe Perhitungan : Absolut 	Perum
	8.4 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	<ul style="list-style-type: none"> > Formulasi pengukuran : $IKLH = (IPA+IPU+ITH)/3$ IPA= Indeks Pencemaran Air Sungai IPU= Indeks Pencemaran Udara ITH= Indeks Tutupan Hutan > Tipe Perhitungan : Absolut 	DLHK

2.3. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Upaya untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan dapat dipercaya, maka sistem akuntabilitas disusun dengan cara dikembangkannya Sistem AKIP (SAKIP). Salah satu unsur yang ada dalam SAKIP adalah perencanaan kinerja tahunan. Rencana kinerja tahunan (RKT) merupakan perencanaan kinerja yang akan dicapai dalam satu tahun dan akan dievaluasi pada akhir tahun untuk mengukur keberhasilan / kegagalan atas pertanggung jawaban yang telah ditetapkan oleh suatu instansi. Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara disusun berdasarkan RPJMD, dapat kami sajikan dibawah ini :

Tabel 2. 4 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1 Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat		1. Harapan Lama Sekolah (HLS)	Thn	11,91
		2. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Thn	7,96
		3. Angka Melek Huruf (AMH)	%	99,62
		4. Angka kelulusan SD / MI sederajat	%	100,00



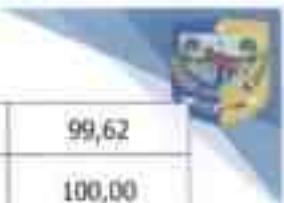
		5	Angka kesulusan SMP/MTs sederajat	%	100,00
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	6	Angka Harapan Hidup (AHH)	Thn	67,03
3	Meningkatnya daya beli masyarakat	7	Rata-rata Pengeluaran Perkapita Ril Yang Disesuaikan (Daya beli)	Jt/Rp.	8,871
		8	Gini Ratio	point	0,30
4	Menurunnya beban pengeluaran keluarga	9	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,58
5	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	10	Opini BPK	predikat	WTP
		11	Nilai LPPD	Poin	2.9500
		12	Nilai SAKIP	Predikat	B
6	Meningkatnya pelayanan public	13	Indeks Pelayanan Publik	poin	3,33
7	Pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pengelolaan potensi unggulan daerah/local	14	Kontribusi Sub Sektor Pertanian terhadap PDRB	%	32,80
		15	Nilai Tukar Petani	%	>100
		16	Kontribusi Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB	%	9,68
		17	Nilai Tukar Nelayan	%	>100
		18	Kontribusi Sektor Akomodasi Dan Makan Minum terhadap PDRB	%	0,37
		19	Kontribusi Sub Sektor Kesenian, Hiburan dan Rekreasi terhadap PDRB (Sektor Jasa Lainnya)	%	0,80
8	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar dan infrastruktur wilayah yang berwawasan lingkungan	20	Cakupan Universal Acces	%	80,71
		21	Persentase pemenuhan Infrastruktur	%	72,50
		22	Persentase Kepatuhan terhadap RTRW	%	86,00
		23	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	%	66,67

2.4. PERJANJIAN KINERJA (PK)

Perjanjian kinerja pada hakikatnya adalah pnyataan komitmen pimpinan yang merepresentasikan komitmen dan janji untuk melaksanakan dan mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu 1 (satu) tahun, kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Selengkapnya dapat kami sajikan sebagai berikut :

Tabel 2. 5 Perjanjian Kinerja tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	1. Harapan Lama Sekolah (HLS)	Thn	11,91
		2. Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Thn	7,96



		3	Angka Melek Hurup (AMH)	%	99,62
		4	Angka kelulusan SD / MI sederajat	%	100,00
		5	Angka kelulusan SMP/MTs sederajat	%	100,00
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	6	Angka Harapan Hidup (AHH)	Thn	67,3
3	Meningkatnya daya beli masyarakat	7	Rata-rata Pengeluaran Perkapita Ril Yang Disesuaikan (Daya beli)	Jt/Rp.	9,010
		8	Gini Ratio	point	0,30
4	Menurunnya beban pengeluaran keluarga	9	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,58
5	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	10	Opini BPK	predikat	WTP
		11	Nilai LPPD	Poin	2.9500
		12	Nilai SAKIP	Predikat	B
6	Meningkatnya pelayanan public	13	Indeks Pelayanan Publik	poin	3,33
7	Pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pengelolaan potensi unggulan daerah/local	14	Kontribusi Sub Sektor Pertanian terhadap PDRB	%	32,80
		15	Nilai Tukar Petani	%	>100
		16	Kontribusi Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB	%	9,68
		17	Nilai Tukar Nelayan	%	>100
		18	Kontribusi Sektor Akomodasi Dan Makan Minum terhadap PDRB	%	0,37
		19	Kontribusi Sub Sektor Kesenian, Hiburan dan Rekreasi terhadap PDRB (Sektor Jasa Lainnya)	%	0,80
8	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar dan infrastruktur wilayah yang berwawasan lingkungan	20	Cakupan Universal Acces	%	80,71
		21	Persentase pemenuhan infrastruktur	%	72,50
		22	Persentase Kepatuhan terhadap RTRW	%	86,00
		23	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	%	66,67

- Rencana Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bolmong Mongondow Utara Tahun 2020 sebesar **Rp. 664.815.365.129,11**
- Rencana belanja langsung sebesar **Rp. 362.687.048.270,92**
- Rencana belanja tidak langsung sebesar **Rp. 215.789.309.320,00**

Tujuan khusus perjanjian kinerja lain adalah untuk:

- 1) Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja pemerintah daerah;
- 2) Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- 3) Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja pemerintah daerah; dan



4) Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah membuat penetapan kinerja dan perjanjian kinerja Tahun 2020 secara berjenjang sebagaimana tugas pokok dan fungsi yang ada. Penetapan kinerja ini merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun, sebagaimana sasaran strategi dan indikator kinerja sebagai tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja tahun 2020.

Tabel 2. 6 Rencana Program dan anggaran perjanjian kinerja tahun 2020

No	URAIAN	ANGGARAN
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	40.521.566.998,84
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	35.667.991.972,00
3	Program peningkatan disiplin aparatur	1.431.297.400,00
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1.409.450.485,50
5	Program Pendidikan Anak Usia Dini	1.428.245.700,00
6	Program Pengembangan Nilai Budaya	252.833.292,00
7	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	303.809.300,00
8	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	20.924.911.000,00
9	Program Pendidikan Non Formal	2.508.336.400,00
10	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	2.374.143.000,00
11	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	923.432.800,00
12	Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pendidikan Dasar	16.136.610.838,00
13	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1.297.811.550,00
14	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	10.051.961.509,00
15	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	25.385.178.913,00
16	Program Pengawasan Obat dan Makanan	208.611.300,00
17	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	787.507.500,00
18	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	427.982.000,00



19	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	406.123.200,00
20	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	6.478.255.400,00
21	Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	0,00
22	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya	26.278.736.632,00
23	Program kerjasama peningkatan pelayanan kesehatan	11.692.034.091,00
24	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	28.661.000,00
25	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	106.291.000,00
26	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	1.228.716.000,00
27	Program penanggulangan penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa	190.514.000,00
28	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	30.000.000,00
29	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	44.167.804.955,97
30	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	30.000.000,00
31	Program Peningkatan Jalan & Jembatan	20.541.822.500,00
32	Program pembangunan jalan dan jembatan	6.215.500.000,00
33	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dari jembatan	1.116.020.000,00
34	Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	228.200.000,00
35	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	3.847.077.000,00
36	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	86.400.000,00
37	Program Pengendalian Banjir	1.515.028.500,00
38	Program Perencanaan Tata Ruang	105.396.200,00
39	Program Pemanfaatan Ruang	2.981.700,00
40	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	180.700.000,00
41	Program pembangunan trotoar, drainase dan gorong-gorong	414.450.000,00
42	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum	7.301.778.000,00



43	Program pengembangan kinerja pengelolaan air limbah	1.613.845.000,00
44	Program Pembangunan, Pengawasan dan Pengendaikan Bangunan Publik	133.395.000,00
45	Program Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Lampu Jalan	959.646.000,00
46	Program Pengembangan Perumahan	2.197.905.775,00
47	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	64.323.900,00
48	Program Daerah Agraria	622.565.500,00
49	Program peningkatan kesanaman dan kenyamanan lingkungan	1.662.922.500,00
50	Program pendidikan politik masyarakat	3.600.000,00
51	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	1.568.733.000,00
52	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	215.800.000,00
53	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	45.600.000,00
54	Program Jaminan dan Bantuan Kesejahteraan Sosial	298.462.500,00
55	Program peningkatan kualitas pelayanan bantuan sosial pangan	20.640.000,00
56	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	370.000.000,00
57	Program Pengendalian dan Operasional Penanggulangan Bencana	105.330.000,00
58	Program pengembangan wilayah transmigrasi	17.937.800,00
59	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	144.506.100,00
60	Program Transmigrasi local	66.477.000,00
61	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	983.417.850,00
62	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	1.997.282.000,00
63	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	45.450.000,00
64	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	77.000.000,00
65	Program penanaman pohon pada lahan diluar Kawasan	274.843.533,00



66	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	223.684.000,00
67	Program Penataan Administrasi Kependudukan	242.400.000,00
68	Program pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	314.040.000,00
69	Program pembinaan kependudukan dan pencatatan sipil	35.000.000,00
70	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	31.269.100,00
71	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	264.331.300,00
72	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	114.903.200,00
73	Program Keluarga Berencana	3.491.729.100,00
74	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	12.185.000,00
75	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	81.352.100,00
76	Program pelayanan kontrasepsi	75.556.948,00
77	Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan	84.007.200,00
78	Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan dimasyarakat	0,00
79	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR	111.787.200,00
80	Program penyelapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga	25.004.000,00
81	Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU	4.740.000,00
82	Program meningkatnya dukungan sarana prasarana pelayanan KB	1.254.452.000,00
83	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	225.818.700,00
84	Program peningkatan pelayanan angkutan	231.541.865,00
85	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	58.258.770,00
86	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	47.312.500,00
87	Program kerjasama informasi dengan mas media	1.735.803.300,00
88	Program E-Government aplikasi dan pengembangan informatika	1.571.391.290,00
89	Program pengamaman informasi pemerintah daerah	2.231.100,00



90	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	48.156.900,00
91	Program Peningkatan iklim Investasi dan Realisasi Investasi	22.960.300,00
92	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	63.212.000,00
93	Program inventarisasi pemanfaatan serta pengawasan migas	23.550.000,00
94	Program peningkatan pengembangan pengelolaan pelayanan public	65.426.100,00
95	Program peningkatan peran serta kepemudaan	491.388.900,00
96	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga	180.205.072,00
97	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	17.734.800,00
98	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	158.355.000,00
99	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	23.855.000,00
100	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	6.000.000,00
101	Program pengembangan budidaya perikanan	157.666.000,00
102	Program pengembangan perikanan tangkap	2.513.411.593,00
103	Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	30.593.799,00
104	Program pengembangan pemasaran pariwisata	439.687.348,00
105	Program pengembangan destinasi pariwisata	1.795.756.000,00
106	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	32.291.400,00
107	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	174.203.730,00
108	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	1.809.533.300,00
109	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	424.492.100,00
110	Program pencegahan dan peranggulangan penyakit ternak	302.114.000,00
111	Program peningkatan produksi hasil peternakan	597.281.000,00
112	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	50.000.000,00
113	Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif	900.000.000,00



114	Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	27.305.000,00
115	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	290.000.000,00
116	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	3.000.000,00
117	Program pengembangan sentra-sentra industri potensial	2.000.000.000,00
118	Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	4.241.117.320,00
119	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah	3.999.299.485,00
120	Program peningkatan pelayanan kedinasan wakil kepala daerah	3.235.270.694,00
121	Program perencanaan pembangunan daerah	1.593.251.200,00
122	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	326.452.600,00
123	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	744.529.000,00
124	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	60.764.200,00
125	Program peningkatan iman dan taqwa	1.484.584.004,61
126	Program Pengembangan Nilai Budaya	795.070.300,00
127	Program Peningkatan Ketatalaksanaan, Sistem Dan Prosedur Organisasi	66.535.918,00
128	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	1.000.885.805,00
129	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	8.551.534.750,00
130	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak criminal	10.000.000,00
131	Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	1.640.092.650,00
132	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	75.708.000,00
133	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	1.339.744.250,00
134	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	225.656.050,00
135	Program pengembangan data/informasi	26.183.000,00
136	Program Kerjasama Pembangunan	209.128.500,00
137	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	47.639.500,00



138	Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	153.096.400,00
139	Program perencanaan pembangunan ekonomi	120.600.900,00
140	Program perencanaan sosial dan budaya	9.863.500,00
141	Program Perencanaan Tata Ruang	63.631.500,00
142	Program pengelolaan pendapatan daerah	480.382.900,00
143	Program pembinaan dan pengembangan aparatur	1.463.192.234,00
TOTAL		362.687.048.270,92



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja

Azas penyelenggaraan negara telah banyak berubah, terutama sistem manajemen pemerintahan di Indonesia saat ini, dimana implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mengarahkan setiap pemerintah daerah menganut azas akuntabilitas kinerja.

Makna azas akuntabilitas inilah yang telah merubah paradigma manajemen pemerintahan selama ini yang hanya berfokus kepada akuntabilitas keuangan saja, yaitu pertanggungjawaban instansi pemerintah cukup dengan menyajikan informasi realisasi anggaran yang telah dilakukan koreksi terhadap laporan keuangan melalui audit pendahuluan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Oleh sebab itu evaluasi kinerja dan evaluasi efisiensi keuangan sudah pada tingkatan penilaian laporan kinerja oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (KemenPAN-RB.RI).

Pengukuran indikator kinerja menggunakan penghitungan persentase pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja sebagaimana ditetapkan melalui realisasi yang berhasil dicapai pada indikator dimaksud, maka penghitungan persentase pencapaian terhadap target memperhatikan karakteristik komponen realisasi :

(1) semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik maka digunakan rumus:

Realisasi
Persentase Capaian = $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$
Rencana

(2) semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus:



Rencana – (Realisasi – Rencana)

Persentase Capaian = _____ X 100%

Rencana

Bab ini akan disajikan uraian analisis pencapaian kinerja setiap Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun Anggaran 2020. Analisis pencapaian kinerja menjelaskan cara menghitung, capaian kinerja, membandingkan realisasi dengan target, capaian tahun lalu, serta capaian kinerja provinsi dan pemerintah pusat sepanjang datanya tersedia. Kemudian dijelaskan program-program yang mendukung persesaran, realisasi anggaran persasaran, faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian sasaran, serta prestasi yang terkait sasaran/indikator kinerja. Adapun skala interval dan predikat capaian kinerja ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 3. 1 Skala interval dan Predikat Capaian Kinerja

Nomor	Bobot Capaian	Predikat
1	2	3
1.	> 95 %	Sangat Berhasil
2.	80 - 95 %	Berhasil
3.	50 - < 80 %	Cukup Berhasil
4.	< 50 %	Kurang Berhasil

Pemerintah Kabupaten Bolsang Mongondow Utara pada Tahun 2020 dapat melaksanakan tugas dalam rangka mewujudkan visi dan misi dalam RPJMD tahun 2018-2023 melalui pencapaian tujuan dan sasaran strategis.

Capaian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dapat dilihat pada uraian realisasi 4 (empat) misi, 4 (empat) tujuan dan 8 (delapan) sasaran dan 23 indikator kinerja utama, diperoleh diperoleh capaian kinerja sasaran setiap misi diuraikan dalam table sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Capaian Kinerja Setiap Misi

No	Pernyataan Misi Dalam RPJMD		Jumlah Tujuan	Jumlah Sasaran	Jumlah Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	
1	Misi I	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan Berbudaya	1	4	9	94,43



2	Misi II	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good and clean Government);	1	2	4	99,74
3	Misi III	Meningkatkan daya saing ekonomi berbasis pertanian, perikanan dan pariwisata	1	1	6	95,15
4	Misi IV	Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur sebagian yang handal	1	1	4	88,36
Rata – Rata Capaian Kinerja						94,42

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa hasil pengukuran kinerja setiap Misi Pemerintah Kabupaten Boneang Mongondow Utara Tahun 2020 menggambarkan rata-rata capaian kinerja 94,42 atau kategori capaian kinerja Berhasil.

3.2. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dan rencana/target kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran ini dituangkan dalam skala interval dan skala ordinal dengan diinterpretasikan dalam pernyataan capaian, sebagai berikut:

Berikut ini diuraikan hasil pengukuran kinerja sasaran strategis tahun 2020, sebagai berikut:

Tabel 3. 3 Pengukuran Kinerja Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
			4	5	6	6
1	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	1 Harapan Lama Sekolah (HLS)	Thn	11,91	11,91	100,00
		2 Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Thn	7,96	8,27	105,53
		3 Angka Melek Huruf (AMH)	%	99,62	99,64	100,03
		4 Angka kelulusan SD / MT sederajan	%	100,00	100,00	100,00
		5 Angka kelulusan SMP/MTs sederajan	%	100,00	100,00	100,00
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	6 Angka Harapan Hidup (AHH)	Thn	67,03	67,66	100,94
3	Meningkatnya daya beli masyarakat	7 Rata-rata Pengeluaran Perkapita Ril Yang Disesuaikan (Daya beli)	Jt/Rp.	8,871	9,062	102,15
		8 Gini Ratio	Point	0,3	0,36	86,48
4	Menurunnya beban pengeluaran keluarga	9 Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,58	5,63	81,35



5	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	10	Opini BPK	Predikat	4,00	4,00	100
		11	Nilai LPPD	Poin	2.9500	3,040	103,05
		12	Nilai SAICP	Predikat	8	8	100
6	Meningkatnya pelayanan publik	13	Indeks Pelayanan Publik	Poin	3,33	3,25	98,48
7	Pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pengelolaan potensi unggulan daerah/local	14	Kontribusi Sub Sektor Pertanian terhadap PDRB	%	32,80	32,02	97,62
		15	Nilai Tukar Petani	%	>100	102,11	102,11
		16	Kontribusi Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB	%	9,68	9,68	100
		17	Nilai Tukar Nelayan	%	>100	98,21	98,21
		18	Kontribusi Sektor Akomodasi Dan Makan Minum terhadap PDRB	%	0,37	0,27	72,97
		19	Kontribusi Sub Sektor Kesenian, Hiburan dan Rekreasi terhadap PDRB (Sektor Jasa Lainnya)	%	0,80	0,80	100
8	Meningkatkan ketersedian infrastruktur dasar dan infrastruktur wilayah yang berwawasan lingkungan	20	Cakupan Universal/ Aces	%	80,71	70	86,73
		21	Persentase pemenuhan infrastruktur	%	86	68,76	79,95
		22	Persentase Kepatuhan terhadap RTRW	%	86,00	80	93,02
		23	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	%	66,67	62,49	93,73

Adapun hasil analisis capaian kinerja terhadap 8 (delapan) sasaran strategis tahun 2020 dijabarkan setiap misi diuraikan pada tabel di abawah ini;

Tabel 3. 4 Capaian Kinerja Misi Per Sasaran

NO	SASARAN STRATEGIS	JUMLAH INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	KATEGORI CAPAIAN
1	2	3	4	5
Misi 1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia				
1	Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat	5	101,11	SANGAT BERHASIL
2	Meningkatnya derajat Kesehatan Masyarakat	1	100,94	SANGAT BERHASIL
3	Meningkatnya daya beli masyarakat	2	94,31	BERHASIL





4	Menurunnya beban pengeluaran keluarga	1	81,35	BERHASIL
MISI II : Memantapkan tatakelola Pemerintahan				
5	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan	3	101,01	SANGAT BERHASIL
6	Meningkatnya pelayanan public	1	98,48	SANGAT BERHASIL
MISI III : Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Berbasis Pertanian				
7	Pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pengelolaan potensi unggulan	6	95,15	SANGAT BERHASIL
MISI IV : Memantapkan Pemerintahan Pembangunan Infrastruktur Wilayah				
8	Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar dan infrastruktur wilayah yang berwawasan lingkungan	4	86,36	BERHASIL
Total / Rata-Rata		23	95,06	SANGAT BERHASIL

Keberhasilan capaian kinerja ini selanjutnya dianalisis untuk mendapatkan informasi mengenai keadaan yang diinginkan. Hasil analisis ini merupakan dasar perbaikan bagi kami untuk meningkatkan kinerja kedepan, perbaikan penerapan manajemen kinerja serta efektifitas penggunaan sumber daya dan anggaran.

Rangkuman Hasil analisis capaian kinerja sasaran strategis tahun 2020 dapat kami uraikan dalam table di bawah ini:

Tabel 3. 5 Rangkuman hasil Analisis Capaian kinerja Sasaran

No	Kategori Capaian	Jumlah Sasaran n	Jumlah Indikator r	Hasil Analisis capaian kinerja indicator
1	2	3	4	5
1	Sangat Berhasil	5	16	Kinerja sangat berhasil, efektif, efisien, inovatif dan bermanfaat.
2	Berhasil	3	5	Kinerja berhasil, sesuai harapan, sedikit perbaikan, berorientasi kinerja.
3	Cukup Berhasil	0	2	Kinerja cukup berhasil, perlu banyak perbaikan dan peningkatan kinerja, perlu konsistensi target dan integritas data, perlu diperjelas hasil yang akan dicapai SKPD.
4	Kurang Berhasil	0	0	Kinerja kurang berhasil, perlu banyak perbaikan yang mendasar, kurangnya keterkaitan antara program/kegiatan dgn sasaran, perlu penajaman indikator outcome/output kegiatan dan perlu penyesuaian Renstra SKPD dengan RPJMD.
5	Tidak Ada Informasi (n.a)	0	0	Kinerja belum dilakukan pengukuran
Jumlah		8	23	



Berdasarkan tabel analisis di atas, terdapat 5 sasaran dan 16 indikator dalam kategori sangat berhasil, 3 sasaran dan 5 indikator berada pada kategori berhasil, dan 2 indikator masuk kategori cukup berhasil.

3.3. Analisis Kinerja

Analisis capaian kinerja dilakukan dengan melihat hasil pengukuran kinerja yang telah dicapai diatas, analisis dilakukan terhadap realisasi capaian indikator kinerja tujuan dan sasaran strategis. Penjelasan-penjelasan mengenai komponen operasionalisasi kinerja, mengenai keberhasilan dan kegagalan serta upaya-upaya yang dilakukan dan harapan kedepan untuk peningkatan kinerja.

Dibawah ini kami uralkan hasil analisis dan evaluasi tingkat capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2020 setelah dilakukan pengukuran kinerja.

Pengukuran kinerja tujuan dilakukan terhadap 6 (enam) indikator dimana 2 (dua) indikator lainnya yakni Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur dan Indeks Reformasi Birokrasi belum dilakukan penghitungan pada tahun 2020. Hasil pengukuran kinerja tujuan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. 6 Capaian Kinerja Tujuan

No	Tujuan	Indikator	Satuan	Kondisi Tahun 2019	Tahun 2020			Target Akhir RPJM D
					Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	poin	66.91	65.88	67.66	102.70	66.23
		Tingkat Kemiskinan	persen	8.45	8.52	8.41	101,29	8.11
		Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio)	persen	36.18	61.12	42.89	129,83	60.87
2	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani	Indeks Reformasi Birokrasi	poin	60.05	59	60.05	101.78	62
3	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkeadilan	Laju Pertumbuhan Ekonomi (ADHK)	persen	6.18	6.21	0.71	11.43	6.24



4	Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur sesuai tata ruang yang berwawasan lingkungan	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	poin	n.a	70,67	68,76	97,29	74,79
Rata - Rata Capaian								90,72

Dari table tersebut diatas menunjukkan bahwa capaian kinerja Tujuan RPJMD Kab. Bolaang Mongondow Utara pada tahun 2020 rata-rata mencapai **90,72** atau kategori capaian kinerja **Berhasil**.

Tujuan 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Tujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia diukur dengan 3 (tiga) indikator yakni Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Kemiskinan dan Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio) dengan rata-rata capaian tujuan 1 yakni 101,67% atau kategori capaian kinerja **Sangat Berhasil**.

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat , yaitu :

- a. Rendah (< 60)
- b. Sedang (60≤IPM<70)
- c. Tinggi (70 ≤IPM<80)
- d. Sangat Tinggi (>80).

IPM Kabupaten Bolaang Mongondow Utara masih tergolong kategori sedang walaupun mengalami peningkatan setiap tahunnya, yakni peningkatan dari 66,32 pada tahun 2018 menjadi 67,66 pada tahun 2020. Sedangkan kinerja tahun 2020 sendiri tercapai 102,70% dari target yang direncanakan.

Tabel 3. 7 Capaian Kinerja Indikator ke 1 Tujuan 1

Indikator ke 1 Tujuan 1	Satuan	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020			Target Akhir RPJMD (Thn 2023)	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD (Thn 2023)
				Target	Realisasi	Capaian		
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	66,32	67,54	67,66	67,66	102,70	66,23	102,16



Peningkatan IPM Kabupaten Bolaang Mongondow Utara setiap tahunnya sejalan dengan meningkatnya seluruh komponen pembentuk IPM yakni Indeks Pendidikan (Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah), Indeks Kesehatan (Angka Harapan Hidup), dan Standar Hidup Layak (Pengeluaran per Kapita disesuaikan). Sampai dengan tahun 2020 IPM Kabupaten Bolaang Mongondow Utara masih berada pada peringkat ke 13 dari 15 kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara dan masih dibawah IPM provinsi dan nasional.

Berikut gambaran perkembangan IPM Kabupaten Bolaang Mongondow Utara selama tahun terakhir yakni tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 :

Grafik 3. 1 Perkembangan IPM



Dengan semakin meningkatnya penyediaan infrastruktur kesehatan dan pendidikan dari aspek kualitas dan maupun kuantitasnya diharapkan dapat meningkatkan angka harapan hidup masyarakat, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah yang merupakan komponen pembentuk IPM dari aspek kesehatan dan pendidikan. Komponen pembentuk IPM lainnya yakni standar hidup layak yang diukur dengan pengeluaran perkapita diupayakan meningkat seiring dengan membaiknya perekonomian masyarakat.

Tingkat Kemiskinan mengalami penurunan dari 8,52% pada tahun 2018 menjadi 8,41% pada tahun 2020, sedangkan capaian kinerja tahun 2020 mencapai 101,29% dari target yang direncanakan. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2020 masih terdapat 6.820 masing-masing penurunan dari jumlah 6.844 jiwa pada tahun 2018. Namun mengalami peningkatan dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada tahun 2019 yang hanya mencapai 6.770 jiwa.

Tabel 3. 8 Capaian Kinerja Indikator ke 2 Tujuan 1

Indikator ke 2 Tujuan 1	Satuan	Tahun 2018	Tahun 2019	2020			Target Akhir RPJMD (Thn 2023)	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD (Thn 2023)
				Target	Realisasi	Capaian		
Tingkat Kemiskinan	Persen	8,64	8,45	8,52	8,41	101,29	8,11	96,30



Persentase angka kemiskinan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada tahun 2020 masih diatas tingkat kemiskinan Provinsi Sulawesi Utara, namun berada dibawah tingkat kemiskinan nasional.

Grafik 3. 2 Tingkat Kemiskinan



Rasio Ketergantungan atau dependency ratio adalah membandingkan usia non produktif (usia 0 s/d 14 tahun dan usia 65 tahun keatas) dengan penduduk usia produktif yakni 15 s/d 64 tahun. Pada tahun 2020 rasio ketergantungan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mencapai angka 42,89% lebih rendah dibandingkan dengan kondisi tahun 2019 yakni 43,05%. Sedangkan tingkat capaian terhadap target tahun 2020 sebesar 129,83% dan sudah jauh melampaui target akhir RPJMD ditahun 2023.

Tabel 3. 9 Capaian Kinerja Indikator ke 3 Dari Tujuan 1

Indikator ke 3 Dari Tujuan 1	Satuan	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020			Target Akhir RPJMD (2023)	Capaian Terhadap Target Akhir RPJMD (2023)
				Targe t	Reali sasi	Capaia n		
Rasio Ketergantungan (Dependency Ratio)	Persen	40,29	43,05	61,12	42,89	129,83	60,87	129,54

Angka tahun 2020 menunjukkan bahwa setiap 100 orang penduduk produktif menanggung 42,89 orang penduduk non produktif. Kondisi rasio ketergantungan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara masih sangat ideal dan merupakan bonus demografi yang sedang terjadi. menggambarkan suksesnya kinerja bidang kesehatan dan pengendalian penduduk melalui keluarga berencana sehingga dampak yang terjadi adalah turunkan proporsi jumlah anak <15 tahun karena penurunan fertilitas, meningkatkan jumlah anak keusia dewasa karena penurunan angka kematian bayi, terjadi ledakan penduduk usia kerja. Kondisi ini disebut *Window of Opportunity* berupa tersedianya kondisi atau ukuran yang sangat ideal pada perbandingan antara



Jumlah penduduk produktif dengan yang nonproduktif. Dengan kata lain pada saat ini Kabupaten Bolaang Mongondow Utara berada pada kondisi ideal untuk meningkatkan produktivitas demi meningkatkan kesejahteraan penduduk.

Grafik 3. 3 Perbandingan Penduduk Produktif dan usia non produktif

Perbandingan Penduduk Usia Produktif dan Usia Non Produktif



= Indeks Kinerja Pemerintah = Tingkat Pengembangan = Tingkat Pelayanan

Tujuan 2. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani

Tujuan menghadirkan tata Kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani diukur dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi. Kategori yang dipergunakan untuk menentukan tingkat pelaksanaan reformasi birokrasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan kategori sebagai berikut:

Tabel 3. 10 Kategori Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi

No	Kategori	Nilai / Angka	Predikat	Interpretasi
1.	AA	>90 - 100	Istimewa	Memenuhi kriteria sebagai organisasi berbasis kinerja yang mampu mewujudkan seluruh sasaran Reformasi Birokrasi.
2.	A	>80 - 90	Sangat Baik	Memenuhi karakteristik organisasi berbasis kinerja namun belum mampu mewujudkan keseluruhan sasaran Reformasi Birokrasi baik secara instansional maupun di tingkat unit kerja.
3.	BB	>70 - 80	Baik	Secara instansional mampu mewujudkan sebagian besar sasaran Reformasi Birokrasi, namun pencapaian sasaran pada tingkat unit kerja hanya sebagian kecil saja.
4.	B	>60 - 70	Cukup Baik	Penerapan Reformasi Birokrasi bersifat formal dan secara substansi belum mampu mendorong perbaikan kinerja organisasi.
5.	CC	>50 - 60	Cukup	Penerapan Reformasi Birokrasi secara formal terbatas di tingkat instansi dan belum berjalan secara merata di seluruh unit kerja.
6.	C	>30-50	Buruk	Penerapan Reformasi Birokrasi secara formal di tingkat instansi dan hanya mencakup sebagian kecil unit kerja.
7.	D	0-30	Sangat Buruk	Memiliki inisiatif awal, menerapkan Reformasi Birokrasi dan perbaikan kinerja instansi belum terwujud.

Indeks Reformasi Birokrasi pada tahun 2020 belum dilakukan pengukuran, sedangkan pada tahun 2019 Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada angka



60,05 lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi tahun 2018 yakni yakni 55,00. Untuk tahun 2020 ditargetkan pada angka 59,00 namun capaian kinerja tahun 2020 belum dapat diukur karena belum adanya data hasil penilaian Indeks Reformasi Birokrasi.

Tabel 3. 11 Capaian Kinerja Indikator Tujuan ke 2

Indikator Tujuan ke 2	Satuan	Tahun 2018	Tahun 2019	2020			Target RPJMD 2023	Capaian Terhadap Target RPJMD 2023
				Target	Realisasi	Capaian (%)		
Indeks Reformasi Birokrasi	poin	55,00	60,05	59,00	60,05	101,78	52,00	96,85

Adapun capaian Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2020 masih dalam proses penilaian oleh sebab itu kami masih menggunakan capaian tahun 2019.

Tujuan 3: Mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkeadilan

Tujuan mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkeadilan diukur Laju Pertumbuhan Ekonomi atas dasar harga konstan.

Laju pertumbuhan ekonomi

Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang diukur dari pertambahan nilai PDRB atas dasar harga konstan. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menurun drastis hingga pada angka 0,71%. Laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018 sebesar 6,18% dan pada tahun 2019 sebesar 6,17%.

Sedangkan capaian target pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 yang ditargetkan 6,21% hanya dapat tercapai 2,74%.

Grafik 3. 4 Laju Pertumbuhan Ekonomi



Tabel 3. 12 Capaian Kinerja Indikator Tujuan ke 3

Indikator Tujuan ke 3	Satuan	Tahun 2018	Tahun 2019	2020			Target RPJMD 2023	Capaian Terhadap Target RPJMD 2023
				Target	Realisasi	Capaian (%)		
Laju Pertumbuhan Ekonomi	Persen	6,18	6,17	6,21	0,71	11,43	6,24	11,38

Kondisi pandemi global Covid-19 yang bermula pada triwulan kedua tahun 2020 di Indonesia



sangat mempengaruhi perekonomian nasional dan daerah. Dampak yang ditimbulkan oleh karena penyebaran Covid-19 sepanjang tahun 2020 tidak hanya mempengaruhi kondisi sosial masyarakat namun juga berdampak pada kondisi ekonomi akibat adanya kebijakan fiskal pemerintah untuk refocusing dan realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19.

Grafik 3. 5 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi



lebih baik bila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Utara dan Nasional yang masing-masing hanya dapat tumbuh -0,99% dan -2,07%.

pemerintah untuk refocusing dan realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19.

Disamping kebijakan fiskal tersebut kebijakan pembatasan sosial yang diberlakukan turut mempengaruhi aktifitas ekonomi masyarakat dan kondisi ini terus berlangsung hingga akhir tahun 2020.

Walaupun demikian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2020 masih

Tujuan 4. Meningkatnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur sesuai tata ruang yang berwawasan lingkungan

Tujuan meningkatnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur sesuai tata ruang yang berwawasan lingkungan diukur dengan indicator Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur. Indikator ini belum dilakukan pengukuran karena belum adanya data hasil survey yang dilakukan oleh instansi terkait. Tabel berikut dapat menggambarkan capaian Indikator Kinerja tujuan keempat :

Tabel 3. 13 Capaian Kinerja Indikator Tujuan ke 4

Indikator Tujuan ke 4	Satuan	Tahun 2018	Tahun 2019	2020			Target RPJMD 2023	Capaian Terhadap Target RPJMD 2023
				Tarjet	Realisasi	Capaian (%)		
Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Point	67,57	n.a	70,67	68,76	97,29	74,79	90,35

Survey dilakukan pada tahun 2020 dengan angka 68,76 point. Target akhir RPJMD pada tahun 2023 yang ditargetkan pada angka 74,79 point sudah tercapai 76,10%.



Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat

Sasaran strategis 1 merupakan upaya mencapai Misi 1 sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD 2018-2023 yaitu "Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya" dan juga untuk mencapai tujuan "Meningkatkan kualitas sumber daya manusia". Pada sasaran "Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat" yang terdiri dari 2 (empat) indikator kinerja dengan rata-rata capaian sebesar 100% kategori **sangat berhasil**.

Perbandingan capaian kinerja pada sasaran strategis 1 dengan masing-masing indikator disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. 14 Analisis Pencapaian Sasaran 1

No	Indikator Kinerja	Capaian			Tahun 2020		Target Akhir RPJMD (2023)
		Tahun 2019	Targe t	Realisa si	%		
1	Harapan Lama Sekolah	11.91	11.91	11.91	100.00	12.02	
2	Rata-Rata Lama Sekolah	8.27	7.96	8.40	105.53	8.41	
3	Angka Melek Huruf (AMH)	99.86	99.62	99.64	100.02	99.91	
4	Angka Kelulusan SD/MI Sederajat	98.62	100.00	100.00	100.00	100.00	
5	Angka Kelulusan SMP/MTs Sederajat	97.76	100.00	100.00	100.00	100.00	
		Rata-Rata			101.11		

1) Harapan Lama Sekolah (HLS)

Grafik 3. 6 Perbandingan Kondisi Perkembangan HLS

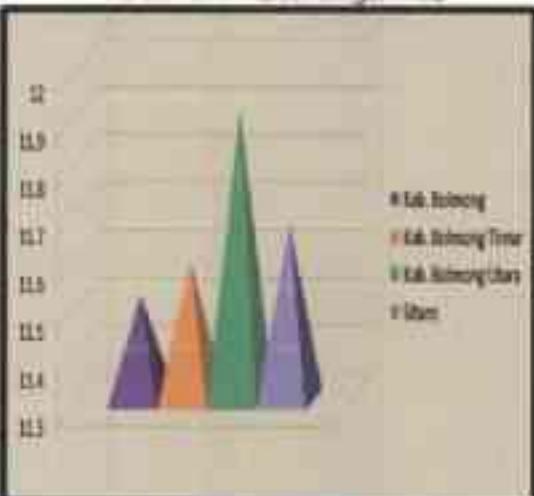


Pada tahun 2020, upaya Pemerintah Kabupaten Bolsang Mongondow Utara untuk meningkatkan angka HLS dinyatakan **sangat berhasil** yaitu mencapai 100.08 Persen (11.91%), dari target yang ditetapkan yaitu 11.90. Dapat kemukakan pula bahwa capaian tahun 2020 telah memenuhi angka yang ditargetkan pada target akhir RPJMD yaitu 11.91 (100 Persen). Harapan Lama Sekolah didefinisikan sebagai lama sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan pendidikan diberbagai jenjang dan dihitung pada usia 7 tahun ke atas.

Jika dilihat pada grafik 3.6. di atas, dapat dinyatakan bahwa perbandingan HLS Pemerintah Kabupaten Bolsang Mongondow Utara berada di bawah capaian HLS Nasional dan HLS Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Namun demikian, perbedaannya tidak terlalu jauh. Jika dilihat pada Grafik 3.7., dapat dibandingkan



Grafik 3.7 Perbandingan HLS



dengan Kabupaten Bolsang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Sitara, dapat dikatakan bahwa capaian angka HLS Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dinyatakan lebih tinggi.

2) Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah menyelesaikan pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Kegunaan indikator ini untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal. Interpretasi dan tingginya angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS)

menunjukkan jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki oleh seseorang. Semakin tinggi angka RLS maka semakin lama/tinggi.

Rata-rata lama sekolah adalah komponen pembentuk IPM dari dimensi Pendidikan. Pada tahun 2020 ditargetkan 7,96 tahun, realisasi 8,40 tahun dengan tingkat capaian 105,53% atau meningkat 1,75 persen dari tahun sebelumnya. Hal ini berarti penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow Utara usia 15 tahun keatas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 8,40 tahun atau setara kelas 2 SMP/sederajat. Jika dibandingkan dengan angka rata-rata lama sekolah tingkat Provinsi Sulawesi Utara (9.49th) dan tingkat Nasional (8.48th), maka untuk tahun 2020 angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (8.40th) lebih rendah dari provinsi dan nasional. Namun demikian, upaya peningkatan kualitas pendidikan terus ditingkatkan.

Selanjutnya, jika dibandingkan dengan beberapa Kabupaten/Kota di provinsi Sulawesi utara, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dapat dikatakan lebih tinggi dalam pencapaian angka rata-rata lama sekolah. Hal ini dapat dilihat pada grafik berikut:

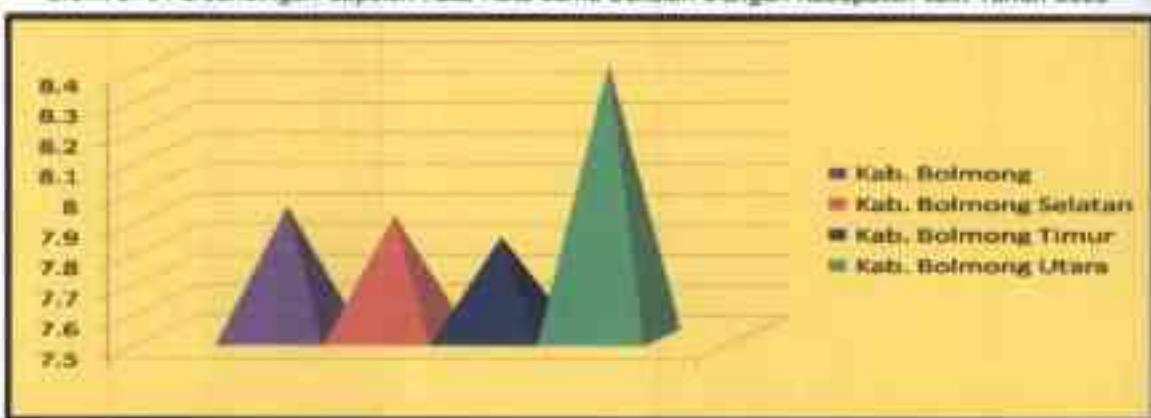
Grafik 3.8 Perbandingan RLS

Kondisi Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah





Grafik 3. 9 Perbandingan Capaian Rata-Rata Lama Sekolah Dengan Kabupaten Lain Tahun 2020



3. Angka Melek Huruf (AMH)

Angka Melek Huruf (AMH) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang memiliki kemampuan membaca dan menulis dengan jumlah seluruh penduduk usia 15 tahun ke atas dikalikan seratus persen. AMH merupakan salah satu indikator kesejahteraan rakyat yang menjadi ukuran keberhasilan pembangunan di sektor pendidikan. Berdasarkan tabel Grafik 3.10 dapat diketahui bahwa target indikator AMH Tahun 2020 ditetapkan sebesar 99.62 persen dan realisasi 99.64 dengan capaian 100.02 persen. Capaian ini dikategorikan *sangat berhasil*.

Grafik 3. 10 Persentase Angka Melek Huruf Per Kecamatan

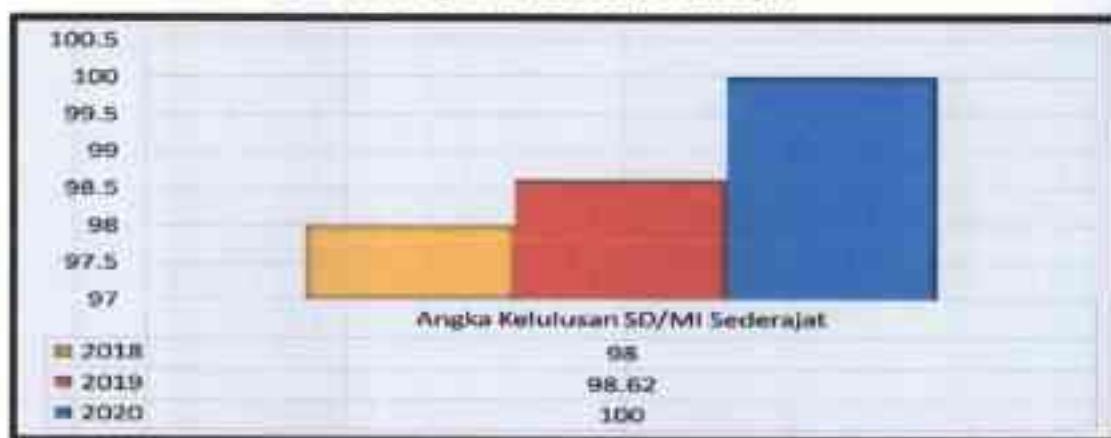


4. Angka Kelulusan SD/MI Sederajat

Indikator Angka Kelulusan SD/MI sederajat pada tahun 2020 dari target 100 Persen tersealisasi 100 Persen dengan capaian 100 Persen. Capaian pada tahun 2020 dapat dinyatakan meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2019 yaitu yang hanya mencapai 98.62 Persen dan tahun 2018 hanya mencapai 98.00 persen, sehingga dapat disimpulkan tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Bolmong Mongondow Utara semakin baik.



Grafik 3. 11 Angka Kelulusan SD/MI Sederajat



Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten

5. Angka Kelulusan SMP/MTs Sederajat

Indikator Angka Kelulusan SMP/MTs sederajat pada tahun 2020 dari target 100.00 tersealisasi 100.00, kategori santri berhasil. Capaian pada tahun 2020 dapat dinyatakan meningkat jika dibandingkan pada dua tahun terakhir. Pada 2019 dari target 100.00% terrealisasi 97.76%, dengan capaian sebesar 97.76%, sementara pada tahun 2018 sebesar 98.00%, sehingga dapat disimpulkan tingkat SMP/MTs sederajat di

Kabupaten Bolaang Mongondow Utara atau kualitas Pendidikan dasar semakin mengalami peningkatan dilihat dari tingkat kelulusan setiap tahunnya.

Grafik 3. 12 Angka Kelulusan SMP/MTs Sederajat



Faktor Pendong

a. Adanya komitmen Pemerintah Daerah Bolaang Mongondow Utara dalam Memenuhi Sarana Gedung Sekolah.

Seiring berjalanannya waktu, jumlah penduduk usia sekolah terus bertambah. Hal ini berkonsekuensi pada penyediaan sarana gedung sekolah oleh pemerintah daerah. Pada tiga tahun terakhir, dilakukan penambahan gedung sekolah sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



Tabel 3. 15 Sarana Gedung Sekolah

No	Satuan Pendidikan	Tahun		
		2018	2019	2020
1	Sekolah Dasar (SD)	98	102	112
2	Sekolah Menengah Pertama	26	31	33
3	Jumlah (SD+SMP)			145

Sumber : Kab. Bolaang Mongondow Utara Dalam Angka Tahun 2021.

b. Adanya kebijakan Peningkatan SDM melalui Bantuan Studi yang bersumber dari APBD

Dalam menopang peningkatan Sumber Daya Manusia, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada beberapa tahun terakhir telah menganggarkan bantuan studi. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan jenjang kualifikasi pendidikan pada jenjang strata satu (S1).

Tabel 3. 16 Kebijakan Bantuan Akhir Studi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

No	Tahun	Satuan (Rp)	Jumlah Penerima	Jumlah (Rp)
1	2018	2.500.000	232	580.000.000
2	2019	2.500.000	240	600.000.000
3	2020	2.500.000	315	787.500.000
Jumlah			787	1.967.500.000

Sumber: BPKD Tahun 2021

c. Adanya komitmen Pemerintah Daerah dalam meningkatkan Mutu dan Kualitas Tenaga Pendidik.

Meningkatnya sumber daya manusia sangat ditentukan oleh kualitas mutu tenaga pendidik. Dengan kata lain, mutu tenaga pendidik menjadi faktor dominan dalam menentukan output pendidikan. Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara memiliki komitmen dalam meningkatkan mutu tenaga pendidik dengan adanya kebijakan program peningkatakn mutu pendidik dan tenaga kependidikan melalui pelaksanaan sertifikasi pendidik, pelatihan bagi tenaga pendidik dan kependidikan, pengembangan sistem penghargaan bagi tenaga pendidik.

Berdasarkan data tahun 2020, terjadi peningkatan kualifikasi tenaga pendidik S1/DIV diseluruh jenjang pendidikan sebanyak 895 orang dari total tenaga pendidik PNS sebanyak 931 orang (96.13 %).



Grafik 3. 13 Kualifikasi Tenaga Pendidik



Sumber: Diklatdik Kabupaten 2020

Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah

Tabel 3. 17 Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah

No	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
1	Masih terdapat Tenaga Pendidik pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang belum memenuhi kualifikasi Pendidikan	Adanya kebijakan penambahan kuota penerimaan CPNS untuk tenaga guru pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini terus diusulkan pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
2	Fasilitas pendukung pendidikan yang masih kurang memadai walaupun telah terpenuhi. Banyak sekolah-sekolah yang belum memiliki fasilitas pendukung laboratorium komputer dan jaringan internet yang notabene sangat dibutuhkan pada era pembelajaran saat ini	Pengusulan anggaran ke Pemerintah Pusat khususnya Dana Alokasi Khusus (DAK) terkait penyediaan sarana pendukung pembelajaran seperti laboratorium dan jaringan internet untuk sekolah.

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Sasaran strategis 2 merupakan salah satu upaya pencapaian Misi 1 yang ditetapkan dalam RPJMD 2019-2023, yaitu "*Hewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berbudaya*" dan Tujuan "*Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia*". Pengukuran pencapaian sasaran dua berdasarkan pada data BPS tahun 2020 yang didukung oleh Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah sebagai Perangkat Daerah utama. Untuk mengukur sasaran ke-2 tersebut ada 1 (satu) Indikator sasaran dan rata-rata capaian kinerja sasarnya sebesar 100,94 % dengan kategori **Sangat Berhasil**.

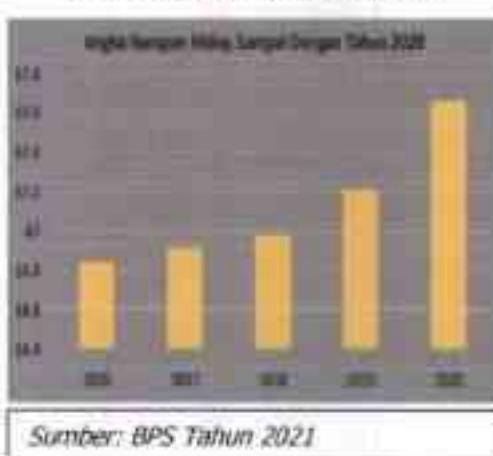
Tabel 3. 18 Pengukuran Pencapaian Sasaran 2

No	Indikator Kinerja	Capaian		Tahun 2020			Target Akhir RPJMD (2023)
		Tahun 2019	Target	Realisasi	%		
1	Angka Harapan Hidup	67.21	67.03	67.66	100.94	67.41	
<i>Rata-Rata Capaian</i>							100.94



Angka Harapan Hidup (AHH), adalah salah satu komponen pembentuk IPM dari dimensi kesehatan. Pada tahun 2020, AHH Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tercatat 67,66 tahun meningkat 0,66 tahun jika dibandingkan tahun sebelumnya. Walaupun Angka Harapan Hidup Kabupaten Bolaang Mongondow Utara masih dibawah angka provinsi dan nasional namun setuju menunjukkan tren meningkat setiap tahunnya, artinya kualitas kesehatan penduduk terus membaik.

Grafik 3. 14 Angka Harapan Hidup

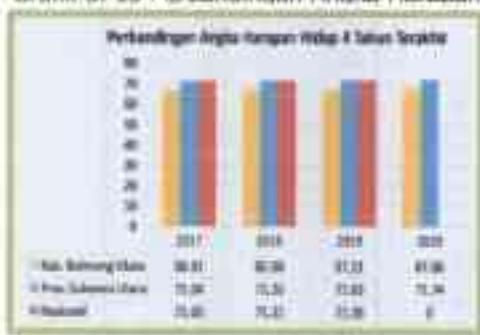


Sumber: BPS Tahun 2021

Kondisi ini didukung oleh fasilitas kesehatan yang tersedia diantaranya rumah sakit, Puskesmas yang sudah tersebar di seluruh kecamatan, puskesmas pembantu, posyandu, dan polindes. Fasilitas kesehatan yang terbanyak adalah posyandu, sebagai fasilitas pelayanan terdekat dengan masyarakat, serta ditunjang dengan tenaga kesehatan, tenaga keperawatan merupakan tenaga yang terus menjadi prioritas dalam formasi rekrutmen penerimaan CPNS beberapa tahun terakhir.

Angka Harapan Hidup menggambarkan derajat kesehatan penduduk. Angka ini dipengaruhi oleh beberapa variabel yang diidentifikasi sangat erat kaitannya dengan masalah kesehatan penduduk. Indikator Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang merepresentasikan aspek kesehatan terus meningkat sejak tahun 2016. Semakin meningkatnya AHH di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mengindikasikan bahwa derajat kesehatan masyarakat semakin membaik, karena AHH merupakan salah satu tolok ukur derajat kesehatan masyarakat. Pada tahun 2020, Angka Harapan Hidup mencapai 67,66 tahun yang mengindikasikan bahwa bayi yang baru lahir pada tahun 2020 memiliki harapan untuk hidup hingga usia 67-68 tahun. Pada Tahun 2020 terjadi perkembangan/kenaikan angka yaitu dari 67,21 persen naik menjadi 67,66 persen atau sebesar 0,66 Persen, sementara itu AHH Provinsi Sulawesi Utara hanya bergerak dari angka 71,63 persen ke angka 71,74 persen atau mengalami kenaikan 0,15 Persen. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kenaikan AHH Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menunjukkan tren positif.

Grafik 3. 15 Perbandingan Angka Harapan



Pada Tahun 2020 terjadi perkembangan/kenaikan angka yaitu dari 67,21 persen naik menjadi 67,66 persen atau sebesar 0,66 Persen, sementara itu AHH Provinsi Sulawesi Utara hanya bergerak dari angka 71,63 persen ke angka 71,74 persen atau mengalami kenaikan 0,15 Persen. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kenaikan AHH Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menunjukkan tren positif.



Faktor Pendukung

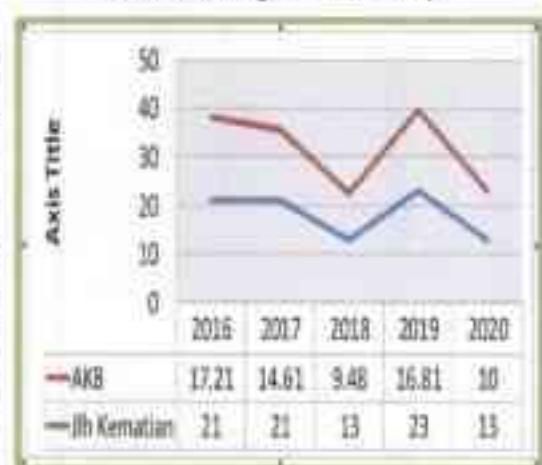
Meningkatnya angka harapan hidup di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada dasarnya ditopang oleh beberapa kinerja sasaran perangkat daerah bidang kesehatan, seperti: menurunnya angka kematian bayi, prevalensi stunting, persentase penurunan angka kesakitan akibat penyakit menular dan tidak menular.

a. Menurunnya Angka Kematian Bayi (AKB)

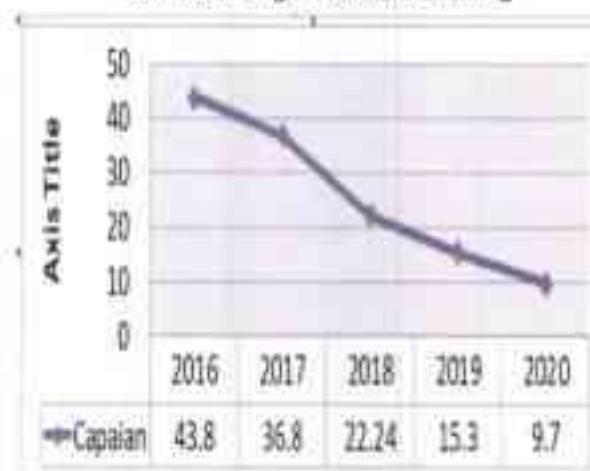
Angka Kematian Bayi di Kab. Bolaang Mongondow Utara mencapai target, sesuai dengan perhitungan dari Rasio angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup dengan menggunakan perhitungan Infant Mortality Rate (IMR). Target RPJMN Rasio angka kematian bayi 16/1000, untuk wilayah Kab. Bolaang Mongondow Utara target kematian bayi 18 orang dan pada Tahun 2020 terdapat kematian bayi 13 org, sehingga target kinerja Dinas Kesehatan sudah capai target. Kematian Bayi terdiri dari kematian Neonatal (0-28 Hari) 9 Orang

Sumber: BPS Tahun 2021

Grafik 3. 16 Angka Kematian Bayi



Grafik 3. 17 Angka Prevalensi Stunting



b. Prevalensi Stunting

Prevalensi Stunting di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan tahun ke tahun mengalami penurunan. Dan untuk Tahun 2020 Angka Prevalensi Stunting 9,7%. Pada Tahun 2016 Angka Prevalensi Stunting 43,8% sehingga Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menjadi salah satu kabupaten Lokus Penurunan Stunting. Berbagai upaya yang dilakukan untuk menurunkan stunting di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dengan membuat Rencana Aksi dan berbagai Inovasi yang telah

dilakukan.

Pada Tahun 2020 Mengikuti Lomba Tingkat Provinsi dan meraih 4 Kategori Penghargaan Yaitu :

- > Terbaik 1 Kategori Kabupaten dengan Pelaksanaan Aksi 5-8 konvergensi penanganan stunting tahun 2019



- > Terbaik 1 Kategori Kabupaten Pelaksanaan Aksi 1 - 4 Konvergensi Penanganan Stunting Tahun 2020
- > Terbaik 1 Kategori Kabupaten Inovatif, Inspiratif dan Replikatif dalam Penanganan Stunting Tahun 2020
- > Terbaik 1 Kategori Kabupaten Pameran Booth/Stand

Gambar 3. 1 Piagam Penghargaan



c. *Presentase Morbiditas Penyakit Menular dan Tidak menular*

Tabel 3. 19 Presentase Morbiditas Penyakit Menular dan Tidak menular

No.	Indikator kinerja	Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Presentase Morbiditas Penyakit Menular dan Tidak menular	%	39	34.9	111.7
				Jumlah	111.7% (Berhasil)

Sumber: Dinas Kesehatan Tahun 2021.

Upaya yang dilakukan Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dengan melaksanakan upaya Promotif melalui promosi kesehatan, Upaya Preventif dengan program Pemberantasan Sarang Nyamuk dengan cara 3M+ di lingkungan masyarakat, melaksanakan Penyelidikan Epidemiologi dan melaksanakan penyemprotan/Fogging di lokasi terjadinya kejadian kasus. Dan Upaya Kuratif untuk memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar kepada penderita demam berdarah.

Angka Penyakit Menular di masyarakat dari tahun 2019 s.d 2020 terjadi penurunan kasus yaitu pada kasus TB Paru, dari 205 Kasus menjadi 134 Kasus, Kasus Malaria dari 8 Kasus menjadi 2 kasus, Kasus Kusta dari 15 Kasus menjadi 8 kasus. Upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara untuk menekan peningkatan kasus dengan melaksanakan program "**KETIKA PINTU DENGAN HATI**", petugas puskesmas langsung melakukan kunjungan rumah untuk memberikan sosialisasi dan pemberian *pot sputum* untuk pemeriksaan lendir pasien (BTA) sehingga langsung dapat diketahui apakah pasien tersebut positif TB dan segera dilakukan pengobatan selama 6 bulan, tenaga kesehatan mendapatkan



penderita yang tidak berkunjung ke Fasyankes.

Pada penanganan lainnya, kasus malaria dan kasus Kusta di masyarakat sudah mengalami penurunan jumlah kasus dari tahun ke tahun. Untuk malaria kabupaten Bolaang Mongondow Utara telah mendapatkan sertifikat eliminasi malaria tahun 2018 dari Menteri Kesehatan RI. Penderita Positif Malaria Tahun 2019 hanya ada 8 kasus. Untuk penderita kusta terjadi penurunan 33.3% tahun 2017 18 kasus dan tahun 2018 12 kasus tetapi mengalami peningkatan kembali pada tahun 2019 sebanyak 15 kasus.

d. Meningkatnya kualitas mutu dan standarisasi fasilitas kesehatan

Akkreditasi Puskesmas dan RSUD adalah pengakuan terhadap puskesmas dan RSUD yang diberikan oleh Lembaga Independent Penyelenggara Akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri setelah dinilai bahwa puskesmas dan RSUD telah memenuhi standar pelayanan puskesmas dan RSUD yang telah ditetapkan oleh Menteri untuk meningkatkan mutu pelayanan puskesmas dan RSUD secara berkesinambungan.

Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan, puskesmas wajib diakkreditasi secara berkala paling sedikit 3 tahun sekali yang dilakukan oleh Lembaga Independent Penyelenggara Akreditasi (Komisi Akreditasi) yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan RI. meningkatnya mutu layanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dilihat dari berapa banyak jumlah Puskesmas yang sudah dilaksanakan Survey Akreditasi oleh Tim Surveyor Komisi Akreditasi Kementerian Kesehatan RI dari Target Tahun 2020 100% realisasi capaian 91.7%.

Tabel 3. 20 Akreditasi Puskesmas Tahun 2015 - 2020

NO	PUSKESMAS	KATEGORI	KATEGORI AKREDITASI	TAHUN PEROLEHAN	HASIL	CAPAIAN	KET
1	RSUD	RS Rujukan Kab	DASAR	2018	-	-	Minimal Akreditasi Utama
2	BOROKO	RAWAT INAP	UTAMA	2019	1	100%	
3	BOLANGITANG	RAWAT INAP	UTAMA	2019	1	100%	
4	BINTAUNA	RAWAT INAP	UTAMA	2019	1	100%	
5	BOHABAK	RAWAT INAP	MADYA	2019	1	100%	
6	OLLLOT	RAWAT JALAN	MADYA	2019	1	100%	
7	MOKODITEK	RAWAT JALAN	DASAR	2019	1	100%	
8	SANGTOMB	RAWAT JALAN	MADYA	2018	1	100%	
9	SANGKUB	RAWAT INAP	DASAR	2018	1	100%	
10	BINTAUNA PANTAI	RAWAT JALAN	DASAR	2018	1	100%	
11	BUKO	RAWAT INAP	MADYA	2017	1	100%	
12	TURTLING	RAWAT JALAN	MADYA	2017	1	100%	
13	BIDONTONG	RAWAT JALAN			-	-	Puskesmas Baru
					11	91.7%	

Sumber: Dinas Kesehatan Tahun 2021



Pada Tahun 2020 Puskesmas di Kabupaten Bolsang Mongondow Utara bertambah 1 Puskesmas, yaitu Puskesmas Bontong yang telah terregistrasi oleh Kementerian Kesehatan RI Tahun 2019 dan belum diajukan untuk dilakukan Survey Akreditasi. Pada Tahun 2020 belum dilaksanakan Akreditasi Puskesmas karena Pandemi Covid-19.

Faktor Kendala/Hambatan

Lebih lanjut dapat dikemukakan bahwa walaupun AHH Kabupaten Bolsang Mongondow Utara mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat kendala/hambatan dalam pencapaian sasaran 2 (*Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat*). Setelah dilakukan telaah dan identifikasi permasalahan dan kendala, ditemukan beberapa permasalahan antara lain:

1. Adanya perubahan kebijakan pelayanan sebagai dampak penerapan protocol kesehatan di masa Pandemi Covid-19 yaitu sejak Maret hingga Desember Tahun 2020 seperti adanya sistem *Work From Home*, keterbatasan pelayanan langsung kepada masyarakat, realokasi tenaga medis pada unit-unit atau satuan tugas penanganan covid-19, serta terdapat tenaga medis yang disolusi.

Grafik 3. 18 Faktor Pendukung



Upaya yang dilakukan sebagai langkah penyelesaian masalah sekaligus upaya menyeluruh pada kebijakan sektor kesehatan dalam mewujudkan sasaran dua adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan pelayanan kesehatan terutama kepada lansia terkait UHH (Usia Harapan Hidup) melalui posyandu lansia yang dilakukan rutin setiap bulan, biasanya dengan pemberian makanan bergizi, adanya senam lansia untuk lansia sehat dan produktif
- 2) Melakukan pemeriksaan kesehatan dari laboratorium untuk screening penyakit pada lansia
- 3) Koordinasi lintas program dan lintas sektoral dalam rangka upaya kesehatan lansia
- 4) Buku kesehatan lansia untuk lansia umur lebih dari 60 tahun dan lansia risiko (umur



- >70 tahun dengan penyakit penyerta) sebagai sarana untuk memantau kesehatan lansia
- 5) Meningkatkan kualitas hidup melalui pemberian imunisasi, sehingga tubuh memperoleh kekebalan terhadap penyakit tertentu
- 6) Melakukan pencegahan terhadap kemungkinan munculnya penyakit menular dan penyakit tidak menular serta kemungkinan adanya gangguan jiwa di masyarakat
- 7) Meningkatkan upaya penanggulangan/pengobatan bila ditemukan penderita penyakit menular maupun tidak menular dan kesehatan jiwa
- 8) Peningkatan mutu pelayanan kesehatan melalui akreditasi FKTP (akreditasi Puskesmas)
- 9) FKTP sesuai standar Permenkes No. 75 Tahun 2014 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS)
- 10) Peningkatan Akses, sarana, dan prasarana serta Alat Kesehatan
- 11) Penguatan profesionalitas SDMK (Sumber Daya Manusia Kesehatan) mulai dari penguatan knowledge/pengetahuan maupun skill/kemampuan melalui pelatihan petugas kesehatan dalam pelayanan kesehatan, misalnya penanganan kegawatdarurat dan service excellent.

Komitmen dan inovasi kebijakan pemerintah daerah di bidang kesehatan dapat dikatakan sudah sangat optimal, hal ini ditandai dengan beberapa penghargaan yang diperoleh selama tahun 2020 sebagai berikut:

Sasaran 3 : Meningkatnya Daya Beli Masyarakat

Tabel 3. 21 Analisis Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian		Tahun 2020		Target Akhir RPMD (2023)
			Tahun 2019	Target	Realisasi	%	
1	Rata-Rata Pengeluaran Perkapita Ril (Daya Beli)	Juta/Rp	8.99	8.871	9.062	102.15	9.43
2	Gini Rasio	Poin	0.36	0.30	0.36	86.48	0.27

Capaian Rata-Rata **94.31**

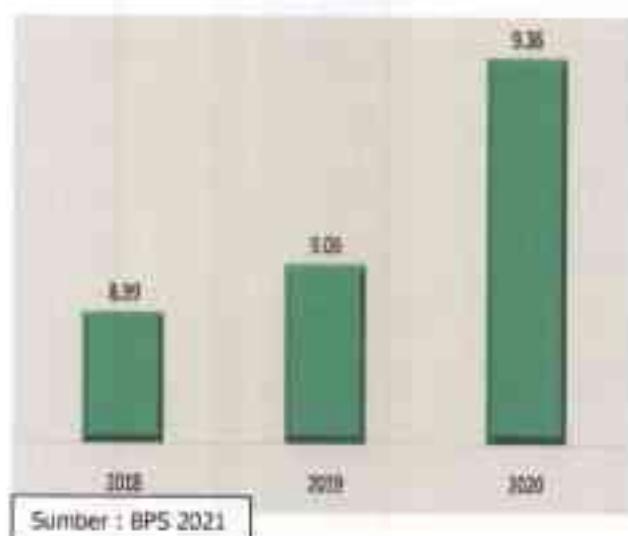
1) Rata-rata Pengeluaran Perkapita Ril Yang Disesuaikan (Daya beli)

Indikator kinerja sasaran tiga yaitu Rata-rata Pengeluaran Perkapita Ril Yang Disesuaikan (Daya beli) target 8.871 realisasi 9.062 dengan capaian 102,15 kategori capaian melempui target. Standar hidup layak yang direpresentasikan melalui indikator pengeluaran



per kapita per tahun yang disesuaikan menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dapat dinikmati oleh penduduk dan sensitif terhadap perubahan kondisi perekonomian. Rata-rata pengeluaran perkapita setahun diperoleh dari Susenas Modul Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang dikonstakan dengan tahun dasar 2012=100. Selanjutnya rata-rata pengeluaran perkapita konstan disesuaikan dengan cara dibagi dengan paritas daya beli (*Purchasing Power Parity*-PPP). Pengeluaran yang telah dibagi dengan PPP ini disebut dengan pengeluaran per kapita yang disesuaikan.

Grafik 3. 19 Pengeluaran Perkapita Penduduk



Pengeluaran perkapita penduduk Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terus meningkat dari 8,99 juta rupiah pada tahun 2018 menjadi 9,36 juta rupiah pada tahun 2020. Daya beli masyarakat adalah pendapatan nominal dibagi inflasi tahun itu, sehingga inflasi rendah ini jelas meningkatkan daya beli masyarakat, maka daya beli masyarakat bolaang mongondow utara masih terjaga, bahkan bisa menopang pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang kuat, sehingga tunut mendukung perekonomian daerah.

Pencapaian pada Indikator Rata-rata engeluaran perkapita riil yang disesuaikan (daya beli) didukung oleh beberapa program sebagai berikut:

1. Program pengembangan industry kecil dan menengah
2. Program penciptaan iklim usaha kecil dan menengah yang kondusif
3. Program pembangunan infrastruktur perdesaan.

Dinas Sosial Kabupaten Bolaang mongondow Utara melalui Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Peningkatan Kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Pelayanan Rehabilitasi Sosial/Perlindungan Sosial terhadap Lanjut Usia, bantuan sosial penuhan kebutuhan dasar (bahan makanan), Bantuan Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Bantuan Langsung Tunai APBD dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2020.

Tabel 3. 22 Program Sosial dan Bantuan Langsung Tunai Tahun 2020

No.	Uraian	Jumlah IKM	Jumlah Dana (Rp)	Sumber Dana
1	Bantuan Langsung Tunai (BLT DD)	Tahap I : 11.094 Tahap II: 10.967	11.993.800.000 9.906.000.000	Dana Desa Dana Desa
2	Bantuan Langsung Tunai (BLT APBD)	Tahap I : 3492 Tahap II : 3671 Tahap III : 3639	2.095.200.000 1.394.980.000 1.783.110.000	APBD APBD APBD
3	Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH)	3.056	2.468.144.000	APBN



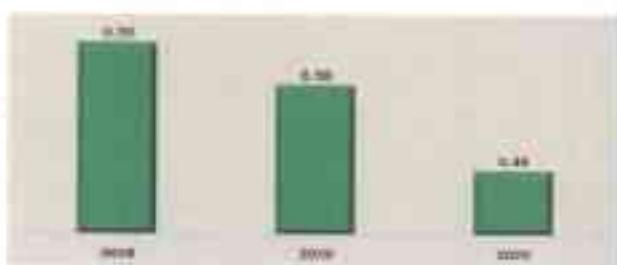
4	Bantuan Sosial Tunai	4.349	14.069.100.000	APBN
5	Bantuan Bahan Makanan Bagi Lanjut Usia	120	150.000.000	APBD
6	Bantuan Sarana Pendukung berusaha bagi KUBE	54 Kelompok	1.031.994.000	APBD
7	Bantuan Pangan Non Tunai	5.430	10.645.200.000	APBN

Sumber : Dinas Sosial, BPKAD, DPMD Tahun 2021.

2). Gini Rasio

Indeks Gini atau Gini Ratio dari target sebesar 0,30 % terealisasi 0,36 %, sehingga capaiannya adalah sebesar 86,48%. Realisasi Indeks Gini tersebut mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 0,38.

Grafik 3. 20 Gini Ratio



Indeks Gini merupakan tolok ukur untuk menghitung tingkat pemerataan pendapatan dengan kriteria $G < 0,30$ berarti ketimpangan rendah; $0,30 < G < 0,50$ berarti ketimpangan sedang dan $G > 0,50$ berarti ketimpangan tinggi. Realisasi Indeks gini tersebut menunjukkan tingkat pemerataan pendapatan masyarakat Kabupaten Bolmong Mongondow Utara berada pada kriteria ketimpangan sedang. Ketimpangan di Kabupaten Bolmong Mongondow Utara lebih disebabkan tingginya pendapatan penduduk kelompok ekonomi menengah ke atas, sedangkan kelompok ekonomi bawah cenderung stagnan.

Gini rasio didukung oleh beberapa program sebagai berikut:

1. Program jaminan dan bantuan kesejahteraan sosial
2. Program pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
3. Program peningkatan kualitas pelayanan bantuan sosial
4. Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial
5. Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial

Sasaran 4 : Menurunnya Beban Pengeluaran Keluarga

Tabel 3. 23 Analisis Capaian Indikator Kinerja Sasaran 4

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2020			Target Akhir RPJMD (2023)
			Tahun 2019	Target	Realisasi %	
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	4.62	4.58	5.63	81.35
Capaian Rata-Rata						81.35

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Bolmong Utara Tahun 2021.

1). Tingkat Pengangguran Terbuka



Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. TPT diukur sebagai persentase jumlah penganggur/pencari kerja terhadap jumlah angkatan kerja dengan pola perhitungan $TPT = (\text{pencari kerja} / \text{angkatan kerja}) \times 100\%$.

Dengan semakin bertambahnya penduduk maka tidak bisa dipungkiri bahwa jumlah penduduk usia kerja (tenaga kerja) dari tahun ke tahun semakin meningkat, namun hal ini belum dibarengi dengan perkembangan lapangan pekerjaan sehingga menimbulkan pengangguran. Walaupun sempat mengalami peningkatan pada tahun 2018, namun secara umum tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara rentang waktu 2016–2020 cenderung mengalami fluktuasi, berangkat dari angka 4,62 persen pada tahun 2019 menjadi **5,63** persen pada tahun 2020 Naiknya pengangguran terbuka di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tidak selalu menandakan kondisi perekonomian yang sedang lesu, namun lebih diakibatkan oleh naiknya jumlah angkatan kerja, transformasi/pergeseran struktur ekonomi serta korelasi investasi dengan penerapan tenaga kerja yang kurang optimai.

Tabel 3. 24 Kondisi Angkatan Kerja Tahun 2020

No	Angkatan Kerja			Persentase Bekerja Terhadap Angkatan Kerja
	Bekerja	Pengangguran	Jumlah	
1	35 832	2 077	37 909	94,52

Sumber : BPS 2021

Jika dilihat pada grafik 3.21 dapat diketahui bahwa pada tiga tahun terakhir, terjadi peningkatan angkatan kerja yang cukup signifikan. Pada tahun 2019 terjadi peningkatan angkatan kerja dari 35094 menjadi 35724 bertambah 630 Orang (1,7 %). Jumlah angkatan kerja dari 35724 pada tahun 2019, menjadi 37099, bertambah 2185 Orang (5,7 %) pada Tahun 2020.

Grafik 3. 21 Peningkatan Angkatan Kerja



Sumber: BPS Tahun 2021

Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 2,53% dari tahun 2019 sebesar 3,10% menjadi 5,63%, dengan tingkat capaian sebesar 77,07%. Hal ini disebabkan oleh adanya wabah Covid-19 yang memberikan dampak berantai disektor industri dan ketenagakerjaan.

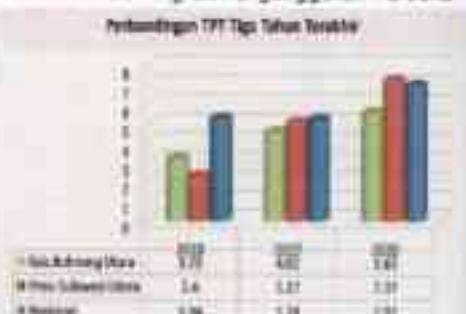


Berdasarkan Grafik 3.22 Dapat diketahui bahwa pada tiga tahun terakhir terjadi peningkatan TPT baik tingkat Kabupaten, Provinsi maupun Nasional. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa problem mendasar atas naiknya angka TPT masalah utama makro ekonomi yang menjadi penghambat pembangunan daerah karena akan menimbulkan masalah-masalah sosial lainnya. Daya serap pasar kerja selain terbatas yang menyebabkan banyaknya angkatan kerja yang menganggur ternyata masalah permintaan tenaga kerja dengan tingkat keahlian khusus membuat tenaga kerja yang ada tidak terserap oleh pasar kerja.

Dalam upaya mengatasi lonjakan tingkat pengangguran terbuka, pemerintah kabupaten Bolsang Mongondow Utara pada tahun 2020 telah melaksanakan beberapa program pendukung sebagai berikut:

1. Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja
2. Program transmigrasi lokal
3. Program perlindungan dan pengembangan lembaga tenaga kerja.
4. Program pengembangan wilayah transmigrasi

Grafik 3. 22 Tingkat Pengangguran Terbuka



Sasaran 5 : Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan

Sasaran strategi 5 ini merupakan salah satu upaya untuk mencapai Misi Ke- 2 yaitu "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good and Clean Government*)" dan tujuan "mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan melayani". Pencapaian misi ini didukung secara terpadu oleh Sekretariat Daerah, Badan Pengelola Keuangan Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan serta Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan.

Tabel 3. 25 Analisis Capaian Indikator Kinerja Sasaran 5

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian Tahun 2020			% Realisasi	Target Akhir RPJMD (2023)
			Tahun 2019	Target	Realisasi		
1	Opini BPK	Predikat	WTP	WTP	WTP	100	WTP
2	Nilai LPPD	Poin	3.040	2.9500	3.040	103,05	3.0350
3	Nilai SAKIP	Opini	B	B	B	100	A
CAPAIAN RATA-RATA						101,01	



Pada tahun 2020 untuk nilai LKPD, LPPD, maupun SAKIP masih dalam proses penilaian. Berdasarkan capaian kinerja pada tahun 2019 Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sudah sesuai target. Adapun capaian indikator pada sasaran meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2020 masih menggunakan capaian tahun 2019.

- * Predikat WTP untuk tahun 2020 dalam proses menunggu hasil audit BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2020.
- ** Capaian indikator nilai LPPD masih menunggu penetapan poin untuk penyelenggaraan pemerintahan tahun 2020.
- *** Nilai DKIP Tahun 2020 dapat diketahui setelah ada penetapan KEMENPAN-RB.

1). Opini BPK

Opini Badan Pemeriksa Keuangan merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mampu secara konsisten mempertahankan opini Waajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah daerah.

Tabel 3. 26 Opini BPK

2016	2017	2018	2019	2020
WTP	WTP	WTP	WTP	Mengalami Penundaan BPK

Pencapaian indikator Opini BPK dianggap maksimal karena sesuai target yang ditetapkan dalam RPJMD. Capaian ini tentunya didukung oleh upaya semua komponen dalam pengelolaan keuangan daerah. Keberhasilan pada capaian indikator 1 sasaran 5 didukung oleh beberapa inovasi pengelolaan keuangan daerah sebagai berikut:

Tabel 3. 27 Inovasi Pengelolaan Keuangan Daerah

No.	Inovation	Before	After
1	2	3	4
1.	Kasda Online Pemkab	Pelaksanaan posting SP2D dilakukan oleh bank Sulutgo sehingga memakan waktu yang lebih lama	SP2D diposting di kasda online yang ditempatkan di BPKD sehingga dapat mengifisiensi waktu pemindahbukuan ke rekening penenerima
2.	Kasda Online OPD	Perangkat daerah melakukan pemindahbukuan/transaksi rekening kantor melalui bank Sulutgo	Setelah memakai aplikasi kasda online versi 2.0 OPD melalui user yang telah ditentukan dapat melakukan pemindahbukuan melalui aplikasi bank Sulutgo serta



			dapat melakukan pencetakan transaksi secara mandiri melalui aplikasi
3.	Kasda Online Desa	Perangkat desa melakukan pemindahbukuan/transaksi rekening desa melalui bank Sulutgo	Setelah memakai aplikasi kasda online versi 2.0 perangkat desa melalui user yang telah ditentukan masing-masing dapat melakukan pemindahbukuan melalui aplikasi bank sulutgo serta dapat melakukan pencetakan transaksi secara mandiri melalui aplikasi
4.	Simda Online	Sebelumnya OPD diharuskan melakukan eksport data SPM yang akan diterbitkan SP2D oleh bidang perpendaharaan melalui flashdisk	Setelah memakai simda online OPD dapat melakukan penginputan SPM langsung ke server sehingga memungkinkan bidang perpendaharaan mencetak data SP2D melalui data yang telah diinput oleh OPD
5.	Aplikasi PBB	Bidang Pendapatan melakukan pencetakan SPPT pajak di kotamobagu	Setelah adanya aplikasi PBB Bidang Pendapatan dapat melakukan pencetakan SPPT Pajak di kantor
6.	Aplikasi PBB Online	Wajib pajak melakukan pengecekan manual di kantor keuangan bidang pendapatan perihal jumlah pajak yang harus disetor	Wajib pajak dapat melakukan pengecekan jumlah pajak yang harus dibayarkan melalui aplikasi PBB online kapan dan dimana saja
		Sebelumnya bidang pendapatan kesulitan melakukan sinkronisasi database wajib pajak dan rekonsiliasi wajib pajak yang telah melakukan penyetoran dengan bank SulutGo	Sudah tersinkronisasi secara online antara database wajib pajak yang ada dibidang pendapatan dengan database yang ada di bank Sulutgo
7.	Aplikasi e-TTP	Sebelum masa pandemi COVID 19 pelaksanaan absensi oleh ASN dilakukan dengan menggunakan finger print dan rawan terhadap penularan COVID 19	Telah dikembangkan sistem absensi menggunakan android system, ASN melakukan absensi melalui Handpone masing-masing dengan waktu dan koordinat lokasi yang telah ditetapkan
			Penularan COVID 19 melalui media absensi dapat dihindari
8.	Simda Integrasi Perencanaan dan Penganggaran	Perencanaan anggaran yang dihasilkan dari proses penyusunan KUA dan PPAS terpisah dengan Simda Keuangan (belum terintegrasi)	Peralihan ke Sistem Informasi Pemerintahan daerah (SIPD), dimulai dari RKPD sudah terintegrasi hingga penyusunan Rancangan APBD.

Sumber: BPBD Kab. Bolmong Mongondow Utara

2). Nilai LPPD

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana



Kerja Pembangunan Daerah yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah Pusat. Indikator nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Bolsang Mongondow Utara tahun sebelumnya (2019) dengan target kinerja 2.937 poin realisasi 3.040 poin capaian 103,51 penilaian Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara. Nilai LPPD Kabupaten Bolsang Mongondow Utara dan tahun ke tahun terus mengalami peningkatan poin. Hal ini menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

3). NILAI SAKIP

Hasil evaluasi penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Pemerintah Kabupaten Bolsang Mongondow Utara oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah disampaikan pada tanggal 19 Februari 2019. Perolehan nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Bolsang Mongondow Utara Tahun 2018 adalah 60,09, predikat "B", dengan interpretasi menuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel. Hal ini sesuai surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1327/AA.05/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019.

Tabel 3. 28 Perkembangan Nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Bolsang Mongondow Utara

TAHUN	NILAI	KATEGORI	KETERANGAN
2016	32,80	C	Kurang (Perlu banyak perbaikan termasuk perubahan yang mendasar)
2017	56,78	CC	Cukup (Memadai) perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar
2018	60,09	B	Baik (perlu sedikit perbaikan)
2019	-	-	Belum ada pernyataan nilai
2020	-	-	Belum Dinilai

Meningkatnya capaian indikator nilai SAKIP dari tahun ke tahun disebabkan oleh Adanya pendampingan langsung dari Tim Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam kegiatan fasilitasi Coaching Clinic SAKIP yang dilaksanakan, baik di Kantor KEMENPANRB maupun di Provinsi Sulawesi Utara sejak tahun 2019.

Sasaran Strategis 6 : Meningkatnya Pelayanan Publik

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran 6 "Meningkatnya Pelayanan Publik" dengan indikator kinerja Indeks Pelayanan Publik, indikator ini saat penyusunan laporan nilainya belum





keluar, disebabkan oleh data-data yang dibutuhkan belum semuanya tersedia.

Tabel 3. 29 Analisis Sasaran 6

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2020		Capaian Kinerja 2020 (%)	Target Akhir RPJMD 2023
			Target	Realisasi		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Indeks Pelayanan Publik	Poin	3,30	3,25	98,48	3,43
	Capaian rata-rata	%			98,48	

Melihat fakta pelayanan publik di instansi teknis terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target sasaran antara lain;

- 1) Pemanfaatan teknologi informasi yang semakin baik dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan penyediaan perangkat jaringan pada masing-masing perangkat daerah.
- 2) Profesionalisme SDM di SKPD yang melaksanakan Pelayanan.
- 3) Pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana pelayanan yang lebih berkualitas.
- 4) Penyediaan dan publikasi dokumen standar pelayanan, penanganan pengaduan masyarakat, dan inovasi pelayanan publik seperti Inovasi "Getar Cinta" (Gerakan Terpadu Cegah Stunting Balita) dan "Ketuk Pintu Dengan Hati (KPH).
- 5) Pelayanan langsung dokumen kependudukan di setiap desa yang dilaksanakan secara berkala.

Sasaran Strategis 7 : Pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pengelolaan potensi unggulan daerah/local

Sasaran "Pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan pengelolaan potensi unggulan daerah/local" yang terdiri dari 6 (enam) indikator kinerja utama dengan rata-rata capaian sebesar 95,15 kategori berhasil.

Berikut tabel capaian dan perbandingan realisasi tahun sebelumnya:

Tabel 3. 30 Analisis Sasaran 7

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2018	2019	Tahun 2020			Target Akhir RPJMD 2023
					Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Kontribusi Sub Sektor Pertanian terhadap PDRB	%	29,14	43,76	32,80	32,02	97,62	38,29
2.	Nilai Tukar Petani	%	94,56	93,34	>100	102,11	102,11	100



	Kontribusi Sub Sektor	%						
3.	Perikanan terhadap PDRB	%	8,60	7,23	9,68	9,68	100	11,30
4.	Nilai Tukar Nelayan	%	98,56	108,11	>100	98,21	98,21	>100
5.	Kontribusi Sektor Akomodasi Dan Makan Minum terhadap PDRB	%	0,29	0,28	0,37	0,27	72,97	0,50
6.	Kontribusi Sub Sektor Kesenian, Hiburan dan Rekreasi terhadap PDRB (Sektor Jasa Lainnya)	%	0,68	0,80	0,80	0,80	100	1,00
	Capaian rata-rata	%					95,15	

Analisis capaian kinerja masing-masing indicator kinerja tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Kontribusi Sub Sektor Pertanian terhadap PDRB

Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB Pada tahun 2020 target 32,80 realisasi sebesar 32,02, dengan capaian kinerja sebesar 97,62%, kinerja sub sektor pertanian di tahun 2020 terjadi penurunan, ini disebabkan oleh Pandemi Covid-19 di awal tahun 2020, walaupun begitu pertumbuhan sektor pertanian di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara adalah positif.

2) Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) pada tahun 2020 dengan target >100% terealisasi sebesar 102,11% atau realisasi capaian sebesar 102,11% capaian ini kategori sangat berhasil. NTP pada tahun 2020 masih tetap berada di >100, hal ini disebabkan oleh bantuan langsung Covid-19 tahun 2020 dari Pemerintah Pusat kepada masyarakat. NTP diperoleh dari perbandingan indeks harga dengan adanya kenaikan indeks harga yang diterima oleh petani serta penurunan indeks harga yang dibayarkan petani.

3) Kontribusi Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB

Kontribusi Sektor Perikanan terhadap PDRB Pada tahun 2020 target 9,68 realisasi sebesar 9,68 % dengan capaian kinerja sebesar 100%, pertumbuhan sektor Perikanan adalah masih melambat.

Pada tahun 2020 nilai PDRB belum dipublikasi oleh BPS sehingga dalam pengukuran ini menggunakan PDRB tahun 2019 (BPS thn 2019), kontribusi sektor perikanan tahun 2020 ADHK sebesar 46,36%, sub sektor perikanan merupakan top contributor pembentukan nilai tambah dalam perekonomian bolaang mongondow utara, meliputi perikanan laut, perikanan air tawar,perikanan budidaya, keramba dan jaring apung dkk.

4) Nilai Tukar Nelayan

Nilai Tukar Nelayan (NTN) pada tahun 2020 dengan target 100% terealisasi sebesar 98,21% atau realisasi capaian sebesar 98,21% capaian ini kategori berhasil.



Badan Pusat Statistik mencatatkan Nilai Tukar Petani (NTN) secara Nasional pada tahun 2019 sebesar 113,53%, angka ini diperoleh dari meningkatnya produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya, keramba, dan air tawar.

5) Kontribusi Sektor Akomodasi Dan Makan Minum terhadap PDRB

- 6) Kontribusi Sektor Akomodasi Dan Makan Minum terhadap PDRB Pada tahun 2020 target 0,37% realisasi sebesar 0,27% dengan capaian kinerja sebesar 72,97%.
- 7) Hal ini menunjukan bahwa sector pertanian merupakan salah satu penggerak dalam pengembangan ekonomi rakyat di Bolmong Mongondow Utara.

Sasaran Strategis 8 : Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar dan Infrastruktur wilayah yang berwawasan lingkungan

Sasaran "Meningkatkan ketersediaan infrastruktur dasar dan infrastruktur wilayah yang berwawasan lingkungan" yang terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja dengan rata-rata capaian sebesar 88,36% kategori sangat berhasil.

Berikut tabel capaian dan perbandingan realisasi tahun sebelumnya:

Tabel 3. 31 Analisis Sasaran 8

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020			Target Akhir RPJMD 2023
					Targe t	Realisas i	Capaian (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Cakupan Universal Acces	%	67,85	79,00	80,71	70	86,73	100,0
2	Persentase Pemenuhan Infrastruktur	%	70,50	71,50	86	68,76	79,95	72,13
3.	Persentase Kepatuhan terhadap RTRW	%	94,74	79,00	86,00	80	93,02	90,00
4.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	%		80,55	66,67	62,49	93,73	100,00
Capaian rata-rata		%					88,36	

Analisis indikator kinerja:

1) Cakupan Universal Access

Indikator Cakupan Universal Acces dengan target 80,71% terrealisasi 70% tingkat capaian sebesar 86,73% predikat berhasil, walaupun kondisi ini masih jauh dari target universal access Nasional yakni 100% akan tetapi kinerja indicator ini terus mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.





Tabel 3.32 PAMSIMAS dan SPAM Tahun 2020

NO	Uraian
1	Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) desa Sangkul II
2	Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) desa Kopi
3	Pembangunan Jaringan Perpipaan Melalui Pemanfaatan Idle Capacity SPAM Terbangun desa Tienjung Labuo
4	Pembangunan Jaringan Perpipaan Melalui Pemanfaatan Idle Capacity SPAM Terbangun desa Birjita I
5	Pembangunan Jaringan Perpipaan Melalui Pemanfaatan Idle Capacity SPAM Terbangun desa Nagara
6	Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Kecamatan Pinogakman

Gambar 3. 2 Layanan Air Minum dan Sanitasi Yang Terbangun



Pemerintah Kabupaten Bolmong Mongondow Utara dalam RPJMD 2018-2023 berichtigan diakhir periode renstra tahun 2023 dapat mencapai *universal access* air minum dan sanitasi. Layanan air minum dan sanitasi yang layak diharapkan dapat dinikmati oleh masyarakat. Program pembangunan air minum dan sanitasi ditunjang dengan pendekatan Program Pamsimas yang berbasis masyarakat, Partisipatif dan berkelanjutan. Sedangkan untuk mengurangi pencemaran air tanah dari limbah rumah tangga melalui Infrastruktur Sanitasi telah dibangun IPAL Komunal di beberapa Desa. Total ukur capaian



ketersediaan infrastruktur air limbah yang memadai baik kuantitas dan kualitas yaitu indikator persentase penduduk berakses air Limbah.

Adapun pada tahun 2020 ditargetkan persentase penduduk berakses air limbah adalah 23%, sementara hasil capaian indikator tersebut pada 2020 adalah 23% sehingga hasil tersebut adalah sesuai dengan target.

Sebagai pendukung untuk mencapai target tersebut dilaksanakan dan direalisasikan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Limbah sebagai berikut :

Tabel 3. 33 IPAL Yang Terbangun

NO	JENIS IPAL KOMUNAL 2019	KAPASITAS	TEMPAT
1	Pembangunan Tangki Septic Komunal	5 sampai 10 KK	Desa Pangkusa
2	Pembangunan Tangki Septic Komunal	5 sampai 10 KK	Desa Bolangitang I
3	Pembangunan Tangki Septic Komunal	5 sampai 10 KK	Desa Buluk Utara
4	Pembangunan Tangki Septic Komunal	5 sampai 10 KK	Desa Langi
5	Pembangunan Tangki Septic Komunal	5 sampai 10 KK	Desa Kopi

Kabupaten Bolaang Mongondow Utara masih bebas dari kawasan kumuh, hal ini dapat dilihat dari persentase kepadatan penduduk, dimana dengan luas wilayah ± 1.856,86 km2, jumlah penduduk sebesar 79.366 jiwa, maka rasio kepadatan penduduk per km2 sebesar 42,74% (BPS 2019). Sedangkan sebaran penduduk menunjukkan distribusi yang merata.

Kawasan kumuh adalah sebuah kawasan dengan tingkat kepadatan populasi tinggi di sebuah wilayah yang dihuni oleh masyarakat miskin, konstruksi bangunan yang seadanya dan tidak tertata.

Sampai dengan tahun 2020 belum terdapat Kawasan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara yang teridentifikasi kumuh.

Tabel 3. 34 Universal Access

Uraian	Satuan	Tahun			
		2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Persentase penduduk berakses air minum	Persen	52,50	52,50	79,00	85
Persentase rumah tinggal bersanitasi	Persen	47,80	63,73	23,00	23,00
Persentase Kawasan kumuh	Persen	0	0	0	0

2) Persentase Pemenuhan Infrastruktur

Persentase Pemenuhan Infrastruktur dengan target 86% terealisasi 68,76% tingkat capaian sebesar 79,95% predikat berhasil.



Kinerja pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam pengembangan wilayah telah diatur dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dimana perencanaan pengembangan wilayah sudah bersifat komprehensif, oleh sebab itu setiap wilayah sudah diatur sesuai peruntukan, antara lain setiap pembangunan perumahan harus memiliki sertifikat tanah dan mengurus ijin mendirikan bangunan (IMB).

Rencana strategisnya bertujuan untuk:

1. Pengendalian pembangunan sesuai peruntukan,
2. Peningkatan dan pengembangan sistem pengawasan pengembangan wilayah,
3. Pembangunan sarana prasarana sesuai standar teknis,
4. Pencegahan kerusakan lingkungan dan daerah rawan bencana

3) *Persentase Kepatuhan terhadap RTRW*

Indikator Persentase Kepatuhan terhadap RTRW dengan target 86% terealisasi 80% tingkat capaian sebesar 93,02% predikat tidak mencapai target.

Untuk mendukung target RPJMD Bolaang Mongondow Utara perihal ketataan terhadap tata ruang, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menetapkan indikator kinerja yaitu Persentasi Rekomendasi Kesesuaian Ruang. Adapun tolok ukur indikator ini yaitu dapat dilihat dari tingkat jumlah rekomendasi kesesuaian ruang yang dikeluarkan bagi para pengguna. Dari data yang diperoleh, diketahui pada tahun 2020 terdapat 177 rekomendasi kesesuaian ruang yang dikeluarkan dari 196 permohonan yang diajukan oleh para pengguna. Rekomendasi kesesuaian ruang dan pelaksanaan pengawasan pengendalian dan pemanfaatan ruang yang dilakukan secara berkala dan intensif merupakan aspek yang menunjang pencapaian ini. Kedepan dalam meningkatkan kesesuaian ruang akan dilaksanakan kegiatan insentif dan disincentif tata ruang.

4) *Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)*

Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dengan target 66,67% terealisasi 62,49% tingkat capaian sebesar 93,73% predikat berhasil.

Untuk mendapatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup terdapat 3 (tiga) unsur parameter yang diukur, 1. Indeks Kualitas Air; 2. Indeks kualitas udara dan 3. Indeks Tutupan Lahan (vegetasi), hasil pengukuran ketiga parameter ini diuraikan dalam table berikut:

Tabel 3. 35 Kualitas Lingkungan

No.	Parameter	Satuan	Nilai 2019	Nilai 2020	Baku Mutu
1.	Indeks Kualitas Air	Nilai	1	n.a	n.a
2.	Indeks Kualitas Udara	Nilai	93,77	93,61	Baik
3.	Indeks Tutupan Lahan	Nilai	70,26	93,86	Baik



- Pengambilan sampel air tidak dapat dilakukan karena adanya pergeseran anggaran untuk dana covid-19, sehingga tidak terdapat pengambilan sampel uji coba air di Tahun 2020. Melihat Hasil pemantauan pada Tahun 2019 terhadap kualitas air sungai dengan sampel di 5 titik Sungai di Bolaang Mongondow Utara, sebagai berikut. Dengan menggunakan formulasi penghitungan indeks pencemaran air sungai maka diperoleh nilai indek sebesar 35,67 untuk pemantauan yang dilakukan pada musim hujan, dan nilai sebesar 47 untuk pemantauan yang dilakukan pada musim kemarau. Apabila diambil nilai rata-rata hasil pemantauan pada musim hujan dan musim kemarau diperoleh nilai indeks pencemaran air sungai sebesar 1, yang jika dikategorikan dalam Indeks Kualitas Air (IKA) maka masuk dalam predikat Baik.
- Pencemaran udara merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi di wilayah perkotaan, tidak terkecuali di Ibukota Kaidipang Kabupaten Bolang Mongondow Utara. Kecenderungan penurunan kualitas udara telah terlihat dengan data indeks kualitas udara yang semakin menurun dalam kurun waktu 3 tahun terakhir. Indeks Kualitas Udara (IKU), pada umumnya dihitung berdasarkan lima pencemar utama yaitu ozon, partikel, karbon monoksida (CO), sulfurioksida (SO₂) dan nitrogen dioksida (NO₂). Namun pada saat ini penghitungan IKU baru menggunakan dua parameter yaitu NO₂ dan SO₂. Parameter NO₂ mewakili emisi kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin, dan SO₂ mewakili emisi dari industri dan kendaraan diesel yang menggunakan bahan bakar solar serta bahan bakar yang mengandung sulfur lainnya.
- Penghitungan indeks tutupan hutan/vegetasi merupakan perbandingan langsung antara luas hutan dengan luas wilayah administrasi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Pada tahun 2020 penghitungan luasan hutan di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebesar 1.856,86ha, dengan jumlah penduduk 85.347 jiwa.

3.4. Akuntabilitas Keuangan

Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada tahun 2020 berdasarkan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2019 mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), hal ini memperlihatkan bahwa manajemen kinerja keuangan sudah memuaskan. Laporan keuangan telah disajikan berdasarkan Standar Akuntasi Pemerintah yang telah berbasis akrual, dengan unsur laporan keuangan yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK). Untuk tahun anggaran 2020 pemeriksaan rinci terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah belum dilaksanakan, sehingga gambaran akuntabilitas keuangan yang disajikan berikut ini masih bersifat sementara dan bersumber dari data Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2020 yang telah diajukan ke Badan Pemeriksa Keuangan RI untuk pelaksanaan audit rinci.



APBD merupakan instrument dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan rakyat demi tercapainya tujuan bernegara. Pencapaian tujuan bernegara pada konteks Pemerintah Daerah dimaksud sangat dipengaruhi dengan capaian target kinerja pendapatan daerah. Pendapatan Daerah pada APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2020 bersumber dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

3.4.1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2020 ditargetkan sebesar Rp. 664.815.365.129,11 terealisasi Rp. 653.330.881.254,49 atau 98,27%.

Sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan transfer dan Lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3. 36 Capaian PAD Tahun 2019

Uraian	Tahun 2020		%
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
PENDAPATAN	664.815.365.129,11	653.330.881.254,49	98,27
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	27.736.023.829,11	26.579.895.506,49	95,83
Pendapatan Pagak Daerah	4.054.458.017,00	4.184.235.618,00	103,20
Pendapatan Retribusi Daerah	4.808.627.591,00	1.160.558.856,50	24,13
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	596.478.408,00	596.478.408,00	100,00
Lain-lain PAD Yang Sah	18.276.459.813,11	20.638.622.623,99	112,92
PENDAPATAN TRANSFER	625.517.730.462,00	615.424.803.329,00	98,39
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	493.971.979.000,00	485.682.851.419,00	98,32
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	119.703.378.000,00	119.703.378.000,00	100,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	11.042.373.462,00	9.238.573.910,00	83,66
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	11.561.610.838,00	11.340.120.000,00	98,05
Pendapatan Hibah	11.561.610.838,00	11.340.120.000,00	98,05

Sumber : LKPD 2020

Pendapatan Transfer terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya, Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya dan Bantuan Keuangan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3. 37 Capaian Pendapatan Transfer

N o	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	493.971.979.000,00	485.682.851.419,00	98,32
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	119.703.378.000,00	119.703.378.000,00	100,00
3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	11.042.373.462,00	9.238.573.910,00	83,66
Jumlah		624.717.730.462,00	614.624.803.329,00	98,38

Sumber : LKPD 2020



Capaian target Pendapatan Transfer Tahun Anggaran 2020 dan total yang ditargetkan pada APBD sebesar Rp. 624.717.730.462,00 dapat direalisasikan sebesar Rp. 614.624.803.329,00 atau 98,38% terdapat Rp10.092.927.133,00 atau 1,62% yang tidak terrealisasi.

Komponen pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Daerah yang Sah yakni pendapatan hibah, dapat dilihat pada dibawah ini :

Tabel 3. 38 Capaian Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan Hibah	11.561.610.838,00	11.340.120.000,00	98,08
	Jumlah	11.561.610.838,00	11.340.120.000,00	98,08

Sumber : LKPD 2020

Capain target pendapatan daerah dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada Tahun Anggaran 2020 ditargetkan sebesar 11.561.610.838,00 dapat terrealisasi sebesar Rp. 11.340.120.000,00 atau tingkat capaian sebesar 98,08%.

Secara rinc target dan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Bolmong Mongondow Utara tahun 2020 berdasarkan obyek dan rincian obyek pendapatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. 39 Capaian Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Uraian	Tahun 2020		%
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
PENDAPATAN	664.815.365.129,11	653.344.818.835,49	98,27
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	27.736.023.829,11	26.579.895.506,49	95,83
Pendapatan Pajak Daerah	4.054.458.017,00	4.184.235.618,00	103,20
Pendapatan Retribusi Daerah	4.808.627.591,00	1.160.558.856,50	24,13
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	596.478.408,00	596.478.408,00	100,00
Lain-lain PAD Yang Sah	18.276.459.813,11	20.538.622.623,99	112,92
PENDAPATAN TRANSFER	625.517.730.462,00	615.424.803.329,00	98,39
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	493.971.979.000,00	485.682.851.419,00	98,32
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	119.703.378.000,00	119.703.378.000,00	100,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	11.042.373.462,00	9.238.573.910,00	83,66
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	11.561.610.838,00	11.340.120.000,00	98,08
Pendapatan Hibah	11.561.610.838,00	11.340.120.000,00	98,08

Sumber : LKPD 2020

3.4.2. Belanja Daerah

Regulasi Refokus Covid-19, Perpres 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur Dan Rincian APBN 2020, PMK No.35/Pmk.07/2020 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Ta 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19 Dan Atau



Menghadapi Ancaman yg Membayakari Perekonomian Nasional. SKB Menteri Mendagri Dan Menteri Keuangan, No.119/2813/Sj Dan No. 177/Kmk.07/2020 Ttg Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Ahun 2020 Dlm Rangka Penanganan Covid-19 Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat Dan Perekonomian Nasional

Belanja daerah menurut PP Nomor 58 Tahun 2005 pasal 20 adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun. Definisi lainnya mengenai belanja seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menggantikan PP 58 Tahun 2005 bahwa Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan, definisi belanja ini sama dengan definisi pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 menjelaskan bahwa belanja adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

Belanja Daerah meliputi belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung yang merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar relatif dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum.

1. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Capaian belanja tidak langsung pada tahun anggaran 2020 mencapai 99,15 % dari total yang dianggarkan sebesar Rp. 339.691.901.826,14 atau terealisasi sebesar Rp. 336.817.480.868,00. Persentase dari setiap jenis belanja tidak langsung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. 40 Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung TA 2020

No	Uraian	Tahun 2020		%
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	Belanja Pegawai	198.180.650.590,00	196.513.995.704,00	99,16
2	Belanja Hibah	7.235.181.580,00	6.640.563.014,00	91,28
3	Belanja Bantuan Sosial	847.000.000,00	787.500.000,00	92,98
4	Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintah Desa	905.324.906,00	536.935.050,00	59,31
5	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa	122.997.267.600,00	122.997.267.600,00	100,00
6	Belanja Tak Terduga	9.525.477.150,14	9.341.219.500,00	98,06
	Jumlah	339.691.901.826,14	336.817.480.868,00	99,15

Sumber : LKPD 2020





2. Belanja Langsung

Belanja langsung adalah belanja pemerintah daerah yang berhubungan langsung dengan program dan kegiatan. Program dan kegiatan yang diusulkan pada belanja langsung disesuaikan dengan kebijakan umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran (PPA), dan Rencana kerja SKPD. Belanja langsung terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal. Belanja pegawai dalam belanja langsung ini berbeda dengan belanja pegawai pada belanja tidak langsung. Belanja pegawai pada belanja langsung antara lain untuk honorarium, uang lembur dan belanja beasiswa pendidikan. Belanja langsung untuk jangka waktu lima tahun ke depan diarahkan pada pencapaian visi dan misi lima tahun Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, antara lain untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan, kesehatan, pengurangan kemiskinan, pembangunan infrastruktur untuk peningkatan pelayanan jasa. Besarnya dana yang dikeluarkan untuk masing-masing kegiatan juga diperkirakan akan meningkat. Sementara itu, khusus untuk belanja modal, pengeluaran belanja modal diprioritaskan untuk membangun prasarana dan sarana yang mendukung tercapainya Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Belanja langsung pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 ditargetkan sebesar Rp. 356,863,389,298,27 terealisasi Rp. 320,733,806,198,54 atau tingkat capaian 89,88% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3. 41 Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung TA. 2020

No	Uraian	Tahun 2020		%
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	
1	Belanja Barang Jasa	187.644.501.343,95	171.810.310.062,00	91,56
2	Belanja Modal	175.042.546.926,97	168.416.243.994,00	96,21
	Total Belanja	362.687.048.270,92	340.226.554.056,00	93,81

Sumber : LKPD 2020

Dari tabel diatas juga dapat di jelaskan bahwa belanja langsung tahun anggaran 2020 didominasi oleh belanja barang dan jasa yaitu sebesar Rp185.571.456.181,00 atau sebesar 51,71% dari total belanja langsung, sedangkan modal sejumlah Rp170.863.318.117,27 atau sebesar 48,17% dan pada pos belanja pegawai sebesar Rp428.615.000,00 atau sebesar 0,13% dari jumlah belanja langsung. Selanjutnya dapat dijelaskan realisasi anggaran dan proporsi belanja daerah terhadap total belanja APBD pada tahun anggaran 2019 sebagai berikut :

Tabel 3. 42 Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung TA. 2019

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2019		
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja tidak langsung	339.691.901.826,14	336.817.480.868,00	99,15
2	Belanja langsung	362.687.048.270,92	340.226.554.056,00	93,81
	Total Belanja	702.378.950.097,06	677.044.034.924,00	96,39



Tabel 3. 43 Proporsi Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung

Terhadap Total Belanja Daerah TA. 2020

Belanja Daerah	Anggaran (Rp)	Proporsi (%)
Belanja tidak langsung	336.817.480.868,00	48,36
Belanja langsung	340.226.554.056,00	51,64
Total Belanja	677.044.034.924,00	100,00

Dari tabel tersebut diatas dapat dilihat bahwa proporsi belanja langsung pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 340.226.554.056,00 atau 48,36% dari total belanja daerah, sedangkan proporsi belanja tidak langsung sebesar Rp. 336.817.480.868,00 atau 51,64%.

3. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target APBD yang telah ditetapkan

Secara umum hambatan dan kendala yang masih terus menerus membelenggu aspek pencapaian target yang telah ditetapkan baik pada pengeilaan pendapatan maupun belanja daerah senantiasa terfokus pada persoalan klasik yaitu ketersediaan Sumber Daya Manusia, disamping permasalahan klasik yang sifatnya internal tersebut juga terdapat permasalahan yang bersifat eksternal yang sangat mempengaruhi capaian target kinerja yang ditetapkan.

Berikut ini permasalahan-permasalahan yang dihadapi pada aspek pengelolaan pendapatan daerah antara lain:

1. TERjadinya PANDEMI Covid-19 tahun 2020;
2. Masih kurangnya kesadaran dan pemahaman wajib pajak akan pentingnya pajak daerah bagi pembangunan daerah;
3. Masih kurangnya kerjasama lintas Perangkat Daerah pengelola Pajak dan retribusi daerah;
4. Pada sektor Pajak Mineral bukan logam dan batuan yang memanfaatkan dana APBN dan APBD Provinsi terkendala pada tahapan penagihan;
5. Masih kurangnya potensi pajak dan retribusi daerah sehingga berpengaruh pada penerimaan daerah;
6. Pada sektor PBB banyak terdapat potensi yang belum terdata;
7. Pajak Bumi dan Bangunan belum melakukan update data perihal perubahan objek.

Tabel 3. 44 Realisasi dan Efisiensi Anggaran 2020 per Program

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%	EFISIENSI
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	40,521,566,998,84	38,554,905,887,00	95,15	1,956,661,111,84

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020
Kabupaten Belitung Moncongko Maret



2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	35,667,991,972.00	34,341,175,274.00	96.28	1,326,816,698.00
3	Program pengembangan disiplin aparatur	1,431,297,400.00	1,392,368,500.00	97.28	38,927,900.00
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1,409,450,485.50	1,331,609,521.00	94.48	77,840,964.50
5	Program Pendidikan Anak Usia Dini	1,428,245,700.00	1,300,976,875.00	91.09	127,268,825.00
6	Program Pengembangan Nilai Budaya	252,833,292.00	232,699,892.00	92.04	20,133,400.00
7	Program Pengembangan Kekayaan Budaya	303,806,300.00	205,312,900.00	67.58	98,496,400.00
8	Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	20,924,911,000.00	20,255,856,764.00	96.80	669,054,236.00
9	Program Pendidikan Non Formal	2,508,336,400.00	2,291,495,957.00	91.36	216,840,443.00
10	Program Pengukuran Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	2,374,143,000.00	2,234,021,215.00	94.10	140,121,785.00
11	Program Manajemen Politeknik Pendidikan	923,432,800.00	786,788,200.00	85.20	136,644,600.00
12	Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pendidikan Dasar	16,136,610,838.00	15,776,239,354.00	97.77	360,371,484.00
13	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	1,297,811,550.00	1,285,724,137.00	99.07	12,087,413.00
14	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	10,051,981,509.00	9,625,175,272.00	96.25	376,786,237.00
15	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	25,385,178,913.00	21,203,774,811.00	83.54	4,177,404,102.00
16	Program Pengawasan Obat dan Makanan	208,611,300.00	202,916,225.00	97.27	5,695,075.00
17	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	787,507,500.00	738,495,725.00	93.78	49,011,775.00
18	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	427,982,000.00	389,481,000.00	91.00	38,501,000.00
19	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	406,123,200.00	335,294,000.00	80.10	80,829,200.00
20	Program Penanggahan dari Penanggulangan Penyakit Menular	5,476,255,400.00	3,489,640,292.00	53.87	2,988,615,108.00
21	Program pelajaran kesehatan penduduk miskin	0.00	0.00	0.00	0.00
22	Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskinmas pembantu dan jaringannya	36,778,736,632.00	25,769,803,091.00	98.06	508,933,541.00



23.	Program kerjasama peningkatan pelayanan kesehatan	11,692,034,091.00	11,582,331,791.00	99.06	109,702,298.00
24.	Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	28,561,000.00	11,500,000.00	40.12	17,161,000.00
25.	Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	106,291,000.00	67,974,300.00	63.95	38,316,700.00
26.	Program peningkatan kesadaran ibu melahirkan dan anak	1,228,716,000.00	331,388,894.00	26.97	897,327,106.00
27.	Program penanggulangan penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa	190,514,000.00	190,322,706.00	99.50	191,294.00
28.	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	30,000,000.00	18,000,000.00	60.00	12,000,000.00
29.	Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	44,167,804,955.97	42,226,050,105.00	95.60	1,941,754,850.97
30.	Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00
31.	Program Peningkatan Jalan & Jembatan	20,541,322,500.00	20,288,235,000.00	98.77	253,567,500.00
32.	Program pembangunan jalan dan jembatan	6,215,500,000.00	5,816,116,682.00	93.57	399,383,118.00
33.	Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	1,116,020,000.00	1,116,020,000.00	100.00	0.00
34.	Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	228,260,000.00	227,362,955.00	99.63	837,045.00
35.	Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	3,847,077,000.00	3,366,492,662.00	87.51	480,584,338.00
36.	Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih	86,400,000.00	86,400,000.00	100.00	0.00
37.	Program Pengendalian Banjir	1,515,028,500.00	1,514,528,871.00	99.97	499,629.00
38.	Program Perencanaan Tata Ruang	105,396,200.00	101,700,400.00	96.49	3,695,600.00
39.	Program Pemanfaatan lahan	2,981,700.00	2,981,700.00	100.00	0.00
40.	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	180,700,000.00	180,064,300.00	99.65	635,700.00
41.	Program pembangunan trotoar, drainase dan gorong-gorong	414,450,000.00	414,065,899.00	98.91	384,101.00
42.	Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum	7,301,778,000.00	6,849,035,850.00	93.80	452,742,150.00
43.	Program pengembangan kinerja pengelolaan air limbah	1,613,845,000.00	1,613,355,000.00	99.97	490,000.00



44	Program Pembangunan, Pengawasan dan Pengendalian Bangunan Publik	133,395,000.00	133,317,799.00	99.94	77,291.00
45	Program Pembangunan dan Rehabilitasi/Pemeliharaan Lampu Jalan	959,646,000.00	959,646,000.00	100.00	0.00
46	Program Pengembangan Perumahan	2,197,905,775.00	2,192,319,450.00	99.75	5,386,325.00
47	Program penataan penggunaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	64,373,900.00	52,991,100.00	82.38	11,332,800.00
48	Program Daerah Agraria	622,565,500.00	612,564,650.00	98.39	10,000,850.00
49	Program peningkatan kesadaran dan kenyamanan lingkungan	1,662,922,500.00	1,637,024,000.00	98.44	25,898,500.00
50	Program pendidikan postik masyarakat	3,600,000.00	3,600,000.00	100.00	0.00
51	Program Fasilitasi dan Pengembangan Fokus Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PKKS) Lainnya	1,668,733,000.00	1,608,496,900.00	96.39	60,236,095.00
52	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	215,800,000.00	213,106,341.00	98.75	2,693,659.00
53	Program Pembangunan Keterbukaan Kesejahteraan Sosial	45,600,000.00	42,000,000.00	92.11	3,600,000.00
54	Program Jamuan dan Bantuan Kesejahteraan Sosial	298,462,500.00	290,855,300.00	97.45	7,507,200.00
55	Program peningkatan kualitas pelayanan bantuan sosial pangan	20,640,000.00	17,914,300.00	86.79	2,725,700.00
56	Program pencarian dan penanggulangan korban bencana alam	370,000,000.00	369,889,884.00	99.97	110,116.00
57	Program Pengendalian dan Operasional Penanggulangan Bencana	105,330,000.00	105,342,206.00	99.92	87,800.00
58	Program pengembangan wilayah transmigrasi	17,937,800.00	17,831,500.00	99.41	106,300.00
59	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	144,506,100.00	144,039,600.00	99.66	466,500.00
60	Program Transmigrasi lokal	68,477,000.00	68,254,000.00	99.67	223,000.00
61	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (pertanian/perkebunan)	983,417,850.00	961,017,150.00	97.72	22,400,700.00
62	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	1,997,282,000.00	1,994,645,900.00	99.87	2,636,100.00
63	Program Pengendalian Pencemaran dan Penyaluran Lingkungan Hidup	45,450,000.00	43,964,950.00	94.53	2,485,050.00



64	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	77,000,000.00	73,220,000.00	95.09	3,780,000.00
65	Program penanaman pohon pada lahan di luar Kawasan	274,843,533.00	238,996,000.00	86.96	35,847,533.00
66	Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	223,684,000.00	221,885,000.00	99.20	1,799,000.00
67	Program Penataan Administrasi Kependudukan	242,400,000.00	240,093,670.00	99.87	306,130.00
68	Program pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	314,040,000.00	310,990,000.00	99.03	3,050,000.00
69	Program pemdaunan kependudukan dan pencatatan sipil	35,000,000.00	35,000,000.00	100.00	0.00
70	Program Peningkatan Kebertahanan Masyarakat Perdesaan	31,269,100.00	31,209,300.00	99.81	59,800.00
71	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	264,331,300.00	250,130,160.00	94.63	14,201,140.00
72	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa	114,903,200.00	99,936,300.00	86.97	14,966,900.00
73	Program Keluarga Berencana	3,491,729,100.00	2,473,869,215.00	70.85	1,017,859,885.00
74	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	12,185,000.00	6,401,100.00	52.53	5,783,900.00
75	Program Penguatan Kelembagaan Pengembalaan Gender dan Anak	81,352,100.00	80,745,100.00	99.25	607,000.00
76	Program pelayanan kontrasepsi	75,556,948.00	75,226,063.00	99.56	330,885.00
77	Program pengembangan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan	84,007,200.00	83,651,000.00	99.58	356,200.00
78	Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kerjasama dimasyarakat	0.00	0.00	0.00	0.00
79	Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KB	111,787,200.00	105,631,600.00	94.49	6,155,600.00
80	Program persiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga	29,004,000.00	24,349,600.00	97.38	654,400.00
81	Program pengembangan model operasional BKK-Posyandu-PADU	4,740,000.00	3,737,200.00	78.84	1,002,800.00
82	Program meningkatnya dukungan saranra prasarana pelayanan KB	1,254,452,000.00	633,547,200.00	50.50	620,909,800.00
83	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	225,818,700.00	224,886,900.00	99.59	931,732.00



84	Program peningkatan pelayanan angkutan	231,541,865.00	230,723,330.00	99.65	818,535.00
85	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	58,258,770.00	50,843,070.00	87.27	7,415,700.00
86	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	47,312,500.00	47,137,600.00	99.63	174,900.00
87	Program kerjasama informasi dengan media massa	1,735,803,300.00	1,735,753,300.00	100.00	50,000.00
88	Program E-Government, aplikasi dan pengembangan informatika	1,571,391,290.00	1,409,745,204.00	89.71	161,646,086.00
89	Program pengembangan informasi pemerintah daerah	2,231,100.00	1,031,100.00	46.21	1,200,000.00
90	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	48,156,900.00	32,551,500.00	67.59	15,605,400.00
91	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	22,960,300.00	22,960,300.00	100.00	0.00
92	Program pembinaan dan pengembangan bidang keteragamaan	63,212,000.00	62,852,000.00	99.43	360,000.00
93	Program inventarisasi perencanaan serta pengawasannya migas	23,550,000.00	23,370,000.00	99.24	180,000.00
94	Program peningkatan pengembangan pengelolaan pelayanan public	65,426,100.00	61,338,600.00	93.75	4,087,500.00
95	Program peningkatan peran serta kepemudaan	491,388,900.00	490,868,900.00	99.89	520,000.00
96	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga	180,205,872.00	180,044,500.00	99.91	160,572.00
97	Program Perintis dan Perpusyariatkan Olah Raga	17,734,800.00	17,730,600.00	99.98	4,200.00
98	Program Peningkatan Sarana dan Peraturan Olah Raga	158,355,000.00	154,093,000.00	97.31	4,262,000.00
99	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	23,855,000.00	23,855,000.00	100.00	0.00
100	Program penyelamatan dan pelestariasi dokumentasi daerah	6,000,000.00	6,000,000.00	100.00	0.00
101	Program pengembangan budidaya perikanan	157,666,000.00	151,892,550.00	96.34	5,773,510.00
102	Program pengembangan perikanan tangkap	2,513,411,593.00	2,492,748,555.00	99.18	20,662,038.00
103	Program Optimalisasi pengelolaan dan pemantauan produksi perikanan	30,593,799.00	29,857,600.00	97.63	725,999.00
104	Program pengembangan pertanian perkebunan	439,687,348.00	333,354,348.00	75.82	106,333,000.00
105	Program pengembangan destinasi pariwisata	1,795,756,000.00	1,621,993,867.00	90.32	173,762,133.00



106	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	32,291,400.00	19,750,000.00	61.16	12,541,400.00
107	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	174,203,730.00	173,939,700.00	99.85	264,030.00
108	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	1,809,533,300.00	1,705,233,086.00	94.46	100,300,214.00
109	Program pemberdayaan petani/pertanian/perkebunan lepasan	424,492,100.00	346,280,950.00	81.58	78,211,150.00
110	Program pengelihian dan penanggulangan penyakit ternak	302,114,000.00	287,344,900.00	95.11	14,765,130.00
111	Program peningkatan produksi hasil peternakan	597,281,000.00	567,391,918.00	95.00	29,889,082.00
112	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	50,000,000.00	49,850,000.00	99.70	150,000.00
113	Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Medengah yang kondusif	900,000,000.00	871,161,000.00	96.80	28,839,000.00
114	Program perlindungan konsumen dan pengawasan perdagangan	27,305,000.00	25,655,464.00	93.96	1,649,536.00
115	Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	290,000,000.00	286,778,409.00	98.89	3,221,591.00
116	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	3,000,000.00	2,850,000.00	95.00	150,000.00
117	Program pengembangan sentra-sentra industri potensial	2,000,000,000.00	1,970,446,000.00	98.02	79,554,000.00
118	Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan	4,241,117,320.00	4,016,237,000.00	94.70	224,880,320.00
119	Program peningkatan pelayanan kedisainan kepada daerah	3,099,399,485.00	3,096,578,172.00	92.43	302,721,313.00
120	Program peningkatan pelayanan kedisainan wakti kepada daerah	3,235,270,694.00	3,115,787,329.00	96.31	119,483,355.00
121	Program perencanaan pembangunan daerah	1,593,251,200.00	1,553,896,543.00	97.53	39,354,657.00
122	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	326,452,600.00	319,183,700.00	97.77	7,268,900.00
123	Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	744,529,000.00	663,566,400.00	89.13	80,962,600.00
124	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	60,764,200.00	55,200,000.00	90.84	5,563,100.00
125	Program peningkatan iman dan taqwa	1,484,584,004.61	1,429,018,500.00	96.26	55,573,504.61
126	Program Pengembangan Nilai Budaya	795,070,300.00	776,444,400.00	97.66	18,625,900.00
127	Program Peningkatan Ketatausahaan, Sistem Dan Prosedur Organisasi	66,535,918.00	65,010,100.00	97.71	1,525,818.00



128	Program optimasi pemanfaatan teknologi informasi	1,000,885,805.00	993,628,314.00	99.27	7,257,493.00
129	Program peningkatan kapasitas kembaga perwakilan rakyat daerah	8,551,334,750.00	8,272,771,773.00	96.74	279,762,977.00
130	Program pemeliharaan kuantitatif dan pencengahan tidak criminal	10,000,000.00	10,000,000.00	100.00	0.00
131	Program peningkatan dan pengembangan pengetahuan keuangan desa	1,640,092,650.00	1,519,260,727.00	92.63	120,811,923.00
132	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	75,788,000.00	68,706,264.00	90.75	7,001,736.00
133	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian petaksanaan kebijakan KOH	1,339,744,250.00	1,259,055,656.00	93.98	80,688,594.00
134	Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	225,656,050.00	149,383,903.00	66.20	76,272,147.00
135	Program pengembangan data/informasi	26,183,000.00	26,105,100.00	99.71	76,900.00
136	Program Kerjasama Pembangunan	209,128,500.00	188,168,100.00	89.98	20,960,400.00
137	Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	47,639,500.00	47,616,050.00	99.95	23,450.00
138	Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar	163,096,400.00	162,947,200.00	99.91	149,200.00
139	Program perencanaan pembangunan ekonomi	120,600,900.00	119,607,500.00	99.24	913,400.00
140	Program perencanaan sosial dan budaya	9,863,500.00	9,840,300.00	99.76	23,200.00
141	Program Perencanaan Tata Ruang	63,631,500.00	63,219,200.00	99.35	412,300.00
142	Program pengelolaan pendidikan daerah	480,382,900.00	401,232,155.00	83.52	79,150,745.00
143	Program pembinaan dan pengembangan aparatur	1,463,192,234.00	1,384,942,325.00	94.65	78,249,909.00
JUMLAH		362,687,048,270.92	340,284,042,936.00	93.82	22,403,005,334.92



BAB IV PENUTUP

Melihat hasil pengukuran dan analisis capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2020 diatas, maka kami dapat sajikan kesimpulan dan rekomendasi perbaikan kedepan atas hasil yang dicapai melalui kinerja sasaran dalam pelaksanaan RPJMD periode tahun 2016-2023.

Laporan hasil pengukuran, evaluasi, dan analisis kinerja, dapat kami simpulkan sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2020, diperoleh **sebesar 94,42%**, dengan pernyataan capaian kinerja **berhasil**;
2. Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah tahun 2020 belum ada rilis resmi, akan tetapi jika menggunakan opini tahun 2019 maka akuntabilitas keuangan memperoleh opini WTP;
3. Hasil analisis capaian kinerja sasaran strategis tahun 2020 dikategorikan berhasil;
4. Dari hasil analisis Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh 16 indikator kinerja yang dikategorikan sangat berhasil, 5 indikator kategori berhasil, 2 indikator kategori cukup berhasil;
5. Meningkatnya angka perkapita Bolaang Mongondow Utara Tahun 2020 sebesar 9,62 juta rupiah per tahun (PDRB-ADHK/ BPS);
6. Meningkatnya Angka Melek Huruf (AMH) tahun 2020 sebesar 99,64%;
7. Meningkatnya Usia Harapan Hidup (UHH) tahun 2020 dengan realisasi sebesar 67,66 Tahun, jika dibanding dengan tahun 2019 sebesar 66,21 Tahun, terjadi peningkatan sebesar 1,45 Tahun, hal ini menunjukkan bahwa pola hidup sehat di masyarakat bolaang mongondow utara semakin baik.
8. Berdasarkan analisis tingkat capaian sasaran dibandingkan tahun 2019, pada tahun 2020 dari 8 sasaran menunjukkan bahwa ada beberapa indikator yang capaiananya menurun ini dikarenakan pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menurun drastis hingga pada angka 0,71%;
9. Kondisi pandemi global Covid-19 yang bermula pada triwulan kedua tahun 2020 di Indonesia sangat mempengaruhi perekonomian nasional dan daerah. Dampak yang ditimbulkan oleh karena penyebaran Covid-19 sepanjang tahun 2020 tidak hanya mempengaruhi kondisi sosial masyarakat namun juga berdampak pada kondisi ekonomi akibat adanya kebijakan fiskal



pemerintah untuk refocusing dan realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19. Disamping kebijakan fiskal tersebut kebijakan pembatasan sosial yang diberlakukan turut mempengaruhi aktifitas ekonomi masyarakat dan kondisi ini terus berlangsung hingga akhir tahun 2020. Walaupun demikian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bolaang Mongondow Utara tahun 2020 masih lebih baik bila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Utara dan Nasional yang masing-masing hanya dapat tumbuh -0,99% dan -2,07%..

B. Peluang perbaikan

1. Laporan Kinerja ini akan dimanfaatkan sebagai acuan perbaikan kinerja kedepan, terutama pada sisi perencanaan;
2. Melakukan perbaikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) disemua level organisasi;
3. Melakukan Rencana Aksi terhadap LHE dari Rekomendasi Inspektorat Provinsi Sulawesi Utara atas evaluasi SAKIP 2019;
4. Segera melakukan rencana aksi terhadap dokumen perencanaan pada SKPD, baik Renstra, RKT dan penyesuaikan sasaran, indikator kinerja dan program;
5. Segera melakukan evaluasi kinerja secara periodik terhadap realisasi capaian target kinerja sebagaimana yang telah diperjanjikan antara Kepala OPD dengan Bupati;
6. Sinergitas pelaksanaan reformasi birokrasi harus lebih diintensifkan, sehingga benar-benar dapat diaplikasikan dalam sistem pemerintahan di daerah dan berorientasi hasil yang pari puma;

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2020 ini, kiranya dapat menciptakan pemerintahan yang *good governance* dan *clean government* demi tercapainya kesejahteraan masyarakat yang dicita-citakan.

Boroko, Maret 2020

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA

